BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Indeks Pembangunan Gender

1. Definisi Gender

Kata gender berasal dari Bahasa Inggris yakni gender yang berarti jenis kelamin. Namun pada dasarnya jenis kelamin merupakan bagian anatomi biologis pemberian Tuhan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Istilah gender bagi para ilmuan sosial yaitu menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan bersifat bawaan (kodrat) ketentuan Tuhan Yang Maha Esa, gender dapat terbentuk dari budaya yang dipahami dan diajarkan dalam lingkungan keluarga sejak kecil.¹

Definisi gender bagi Mansour Fakih adalah suatu sifat yang terdapat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dibangun menurut sosial ataupun

¹ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: UB Press, 2017), h. 3.

kultural.² Sehingga pengertian gender bukan merujuk pada jenis kelamin, hal ini dikarenakan jenis kelamin ditentukan secara biologis yang melekat pada manusia. Konsep dari gender yaitu berkaitan dengan ciri dari sifat yang dapat dipertukarkan dan dapat mengalami perubahan baik perubahan antar waktu maupun perbedaan antar kelas.

Sri Hartati berpandangan bahwa gender merupakan suatu bentuk sosial yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan wilayah, negara, ideologi, zaman, suku, ras, kultural, status sosial, pemahaman terhadap agama, ekonomi, hukum serta politik.³ Sehingga dari pengertian ini gender bukanlah kodrat dari Tuhan, melainkan sifat yang terbentuk dari manusia, berdasarkan berbagai faktor yang mempengaruhinya dan gender dapat mengalami perubahan, bersifat relatif dan dapat dipertukarkan.

Agnes Vera Yanti Sitorus memandang gender sebagai suatu konsep yang bersumber pada suatu sistem

² Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, h. 8.

³ Sri Hartati, *Gender dalam Birokrasi Pemerintah* (Surabaya: PT Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 52.

peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan ditetapkan oleh perbedaan biologis, namun ditetapkan oleh lingkungan sosial budaya, ekonomi dan politik.⁴ Adapun kesetaraan gender yaitu status yang sama antara laki-laki dan perempuan serta mempunyai kondisi dan kemampuan yang sama untuk merealisasikan hakhaknya selaku manusia dan berkontribusi pada pembangunan nasional, politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Menurut Risky Puspita Sari dkk, pembangunan gender adalah salah satu indikator yang berfungsi untuk mengetahui keberhasilan atau pencapaian pembangunan.⁵ Permasalahan yang menjadi pokok utama sebagai penghalang proses kesetaraan gender yaitu adanya pengabaian mengenai topik tentang kesetaraan dan keadilan gender. Ditambah permasalahan budaya yang

⁴ Agnes Vera Yanti Sitorus, "Dampak Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Sosio Informa* 2, no. 1 (2016): h. 89.

⁵ Risky Puspita Sari, Sudati Nur Sarfiah, dan Lucia Rita Indrawati, "Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2011 - 2017 (Studi asus 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah)," DINAMIC: Directory Journal of Economic Vol. 1, no. 4 (2019): h. 468.

menjadi penyebab terhambatnya pembangunan kesetaraan gender.

Ideologi gender yang berkembang masyarakat ini, berbicara mengenai tugas urusan rumah tangga atau ranah domestik tugas perempuan perempuan. sedangkan tugas yang menjadi ranah laki-laki yaitu tugas yang berkaitan dengan publik seperti memperoleh pendapatan. Persoalan inilah yang menjadi penyebab kontradiksi antara peran perempuan dan laki-laki yang melahirkan budaya patriarki, yaitu konsep yang menyatakan dominasi kaum laki-laki ditingkat sosial untuk memegang posisi kekuasaan baik politik, sosial, ekonomi, lingkungan pekerjaan, dan perempuan tidak memiliki akses untuk mencapai posisi tersebut.

Budaya patriarki inilah yang menjadi salah satu penyebab diskriminasi gender atau perbedaan perlakuan terhadap kaum laki-laki. Budaya patriarki ini memandang peranan perempuan dalam urusan rumah tangga tidak dinilai sebagai suatu pekerjaan, karena pekerjaan rumah

tangga itu tidaklah termasuk pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, sehingga perempuan sangat bertumpu pada penghasilan suaminya. Sedangkan di ranah publik, lakilaki mengabaikan peran perempuan dari jenis-jenis pekerjaan yang berpendapatan tinggi.

Prinsip pokok dari pembangunan manusia yaitu meyakinkan manusia, baik laki-laki ataupun perempuan memiliki kebebasan dalam menentukan banyaknya pilihan dihidupnya, dapat mengetahui potensi atau kemampuan pada dirinya, dan dengan bebas menjalani kebidupan yang berharga dan terhormat. Dengan prinsip pokok tersebut maka pemberian kesempatan yang sama pada laki-laki maupun perempuan menjadi indikator untuk mengukur pembangunan manusia baik laki-laki maupun perempuan.

2. Teori Gender

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat atas 2 konsep yaitu konsep biologis dan non biologis. Konsep biologis yang mengacu pada segala yang terkait

⁶ Hartati, Gender dalam Birokrasi Pemerintah, ..., h.94.

dengan adanya perbedaan ragam fisiologis, seperti fungsi reproduksi. Kemudian perbedaan selanjutnya ditinjau dari konsep non biologis yang digambarkan dengan konsep gender yang mengacu pada perbedaan bentuk sosial dan budaya. Analisis mengenai gender dikaji berdasarkan tiga teori utama yaitu:

a. Teori Nature

Teori *nature* menurut Edward Wilson dalam Alifiulahtin Utaminingsih menerangkan mengenai perbedaan peran, fungsi, maupun tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan hakikatnya bersifat alami (*nature*) atau sebagai kodrat ketetapan Tuhan.⁷ Hal ini dikarenakan anatomi biologis yang terdapat pada diri manusia, sehingga jenis kelamin kaum lakilaki dan perempuan menjadi faktor pokok penentuan peranan sosial antara keduanya.

Teori ini menyatakan bahwa laki-laki memiliki peran utama (ordinat) pada masyarakat disebabkan

⁷ Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, ..., h. 18.

laki-laki dilihat lebih kuat. Sedangkan kaum perempuan memiliki peran yang dikuasai (sub-ordinat) disebabkan terbatasnya ruang gerak dikarenakan faktor biologis yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui. Dengan keterbatasan ini menyebabkan perempuan dinyatakan kurang produktif. Sehingga perbedaan ini menciptakan pemisahan peran, fungsi, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

Maka akibat dari dikotomi tersebut, menjadikan laki-laki berperan sebagai kepala keluarga dan bertugas mencari nafkah utama dengan bekerja di ruang lingkup publik (luar rumah), dan perempuan berperan dalam ranah domestik, yakni memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan urusan rumah tangga.

Berdasarkan teori *nature*, diterangkan bahwa gender merupakan "kodrat alam" yang tidak perlu dipertentangkan lagi keberadaannya. Hal ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda dari sudut pandang biologis sebagai ketetapan

Tuhan yang bersifat pemberian dan berlaku secara umum sesuai dengan peranan masing-masing jenis kelamin, dan tidak dapat dipertukarkan.

b. Teori Nurture

Teori *nurture* menurut Edward Wilson dalam Wahyu Nugraheni menjelaskan bahwa aspek biologis bukanlah penyebab adanya perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan, namun tercipta oleh pembentukan karakter dimasyarakat hasil kontruksi budaya sehingga menghasilkan peran dan budaya yang berbeda. Berdasarkan teori *nurture* yang menganggap bahwa peranan sosial yang dilakukan manusia merupakan aturan baku dan diyakini sebagai doktrin keagamaan, pada dasarnya bukan sebagai kehendak (kodrat) Tuhan, dan bukan sebagai hasil determinasi biologis namun sebagai hasil konstruksi atau bentukan sosial. Maka, nilai-nilai mengenai bias gender yang

⁸ Wahyu Nugraheni, "Peran dan Potensi Wanita dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan," *Journal of Educational Social Studies* Vol. 1, no. 2 (2012): h. 106.

terjadi pada masyarakat dengan budaya patriarki dipahami oleh faktor biologis, yang sebenarnya merupakan hasil konstruksi kebudayaan yang ada di masyarakat.

Teori *nurture* menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil kontruksi sosial budaya yang terjadi di masyarakat, dan bukan sebagai pemberian Tuhan (kodrati), sehingga melahirkan peran, fungsi serta tanggung jawab yang berbeda pula. Pemikiran secara sosiologis melahirkan feminisme, yaitu gerakan kaum perempuan dengan tujuan utamanya pada kegiatan pemberdayaan perempuan dengan segala potensi yang dimiliki, agar memperoleh kedudukan yang setara dengan kaum laki-laki pada seluruh bidang, gerakan ini juga biasa disebut dengan emansipasi wanita.

c. Teori Equilibrium

Teori *equilibrium* menurut Robert Merton dan Talcott Parsons dalam Mansour Fakih ini mengutamakan konsep kemitraan dan keselarasan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. ⁹ Teori ini menjelaskan mengenai keharusan antara laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama dalam keharmonisan relasi gender baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan lingkungan negara tanpa mempertentangkan relasi antar keduanya.

Fokus utama dalam teori *equilibrium* yaitu pembentukan kebijakan maupun strategi dalam pembangunan yang memperhitungkan serta memahami kepentingan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang dan saling melengkapi baik dari kelebihan maupun kekurangan masing-masing pihak untuk mendukung penerapan potensi-potensi yang dimiliki, upaya ini disebut dengan pembangunan dalam perspektif gender.

Ketimpangan dalam peranan dan fungsi dari laki-laki dan perempuan memicu munculnya isu

⁹ Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, h. 80.

kesetaraan gender. Diskriminasi gender memandang bahwa kaum perempuan dibentuk sebagai makhluk yang irasional, emosional, dan lemah lembut. Sedangkan laki-laki diciptakan sebagai manusia yang bersifat rasional dan kuat. Perbedaan gender bukanlah suatu masalah yang serius jika tidak menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) yang merugikan. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat sebagai berikut:

- 1) Marginalisasi, gender differences menyebabkan marginalisasi pada diri perempuan yang dapat diperparah jika didukung oleh kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama yang bias, keyakinan, tradisi adat kebudayaan, serta asumsi pemahaman yang membedakan sehingga terlihat menyisihkan keberadaan salah satu kaum.
- Subordinasi, yaitu penilaian mengenai peranan yang dilakukan laki-laki ataupun perempuan

 10 Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, h. 72.

bernilai lebih rendah dari yang lainnya. Subordinasi terhadap perempuan timbul dari akibat persepsi bahwa perempuan tidak dapat andil menjadi seorang pemimpin.

- 3) Stereotip, yaitu pandangan negatif terhadap lakilaki ataupun perempuan, misalkan stereotip mengenai peranan laki-laki untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan sifat perempuan yang selalu melibatkan perasaan, emosional dan lemah.
- 4) Violence (kekerasan), yaitu serangan pada fisik maupun penilaian mental psikologi seseorang yang dilakukan pada lawan jenis kelamin tertentu. Contoh dari gender violence yaitu adanya tindak kekerasan fisik maupun non fisik, pelecehan, penyiksaan, pornografi dan lainnya.
- 5) Beban kerja yang berlebih, perempuan terkontruksi berperan mengurus tugas rumah tangga. Kontruksi pemahaman ini membentuk penilaian publik jika seorang perempuan yang berkarir di luar bidang

rumah tangga, dianggap memiliki beban kerja ganda.

Dengan demikian, teori *equilibrium* atau keseimbangan berpandangan pada kesetaraan dan keadilan gender dengan senantiasa memperhatikan kasus terkait gender yang dapat mengalami perubahan.

3. Definisi Indeks Pembangunan Gender

United Nations Development Program pada tahun 1995 memperkenalkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang berfungsi untuk mengukur ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia. 11 Indeks pembangunan gender mengukur pencapaian pembangunan laki-laki dan perempuan berdasarkan rasio dari Indeks Pembangunan Manusia laki-laki dan Indeks Pembangunan Manusia perempuan sehingga dapat diketahui implikasinya.

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten* 2019 (Banten: BPS Provinsi Banten, 2020), h. 17.

Capaian pembangunan yang dilakukan oleh perempuan dapat diketahui dengan melihat apakah terjadi perbedaan perlakuan terhadap perempuan baik pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Untuk menghitung pencapaian pembangunan gender, UNDP telah menetapkan metode pengukuran IPG dengan mengukur komponen-komponen pembangunan gender berdasarkan dimensi-dimensi pembentuknya.

Pada mulanya Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur disparitas dari komponen IPM menurut jenis kelamin. Angka dari IPG tersebut tidak dapat dideskripsikan terpisah dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2014 UNDP menentukan metode baru untuk menghitung IPG sebagai angka untuk mengetahui capaian pembangunan manusia berbasis gender.

Penyusunan indeks komposit IPG ini didasarkan pada komponen-komponen pembentuk pembangunan manusia dari sisi laki-laki dan perempuan. Penyusunan indeks komposit IPG diantaranya:

a. Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur panjang dan sehat dapat mencerminkan keadaan aspek kesehatan yang diperoleh oleh masyarakat. Dengan mengetahui pencapaian pada aspek kesehatan maka akan diketahui seberapa besar kinerja pembangunan pada bidang kesehatan. Dimensi umur panjang dan sehat IPG, dihitung berdasarkan indikator umur harapan hidup saat lahir penduduk lakilaki dan perempuan berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010.

Deklarasi HAM PBB tanggal 10 November 1948 menyebutkan kesehatan sebagai aspek penting dari hak asasi manusia, karena setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan serta keluarganya. 12 kesejahteraan diri dan Negara diharuskan untuk menghormati, melindungi, menjamin dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan bagi penduduknya.

12 /

¹² Statistik, *Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten 2018*, h. 24.

b. Pengetahuan

Selain kesehatan, pendidikan merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang dijamin oleh konstitusi maupun undang-undang. Hak mendapatkan pendidikan juga sebagai amanat utama yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

Dimensi pengetahuan IPG diukur menggunakan indikator angka harapan lama sekolah penduduk lakilaki dan perempuan yang berusia 7 tahun serta rata-rata lama sekolah bagi penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia 25 tahun keatas, kedua data tersebut diperoleh dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Upaya pemerintah untuk memenuhi hak atas aspek pendidikan bagi masyarakat belum dilaksanakan secara menyeluruh. Adanya kebijakan liberalisasi bidang pendidikan yang berimplikasi pada mahalnya biaya pendidikan. Masyarakat miskin tidak mendapatkan haknya atas pendidikan dan ini akan

mengakibatkan keterbelakangan pendidikan yang dihadapi masyarakat miskin.

Tidak meratanya hak atas akses pendidikan akan memperkuat budaya patrilineal yaitu budaya yang menghadirkan stereotip gender yang memandang bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi. Maka stereotip gender ini perlu dihilangkan dengan peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan.

c. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak sebagai tolok ukur pencapian kesejahteraan masyarakat. Standar hidup layak dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita penduduk laki-laki dan perempuan yang diperoleh dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data yang digunakan untuk mendukung perolehan data pengeluaran per kapita penduduk laki-laki dan perempuan, maka digunakanlah data upah yang diterima, jumlah angkatan kerja serta jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.

Tindakan diskriminasi juga dapat terjadi dalam lingkungan pekerjaan. Namun pelarangan tindakan diskriminatif dalam pekerjaan ini telah tertuang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perlakuan diskriminatif dalam dunia pekerjaan telah berlangsung lama dan mampu membuat hukum budaya diskriminatif. Modal yang harus dimiliki tenaga kerja yaitu pengetahuan, keterampilan serta dedikasi, namun semua ini tersisihkan jika tindakan membedakan bentuk fisik dan jenis kelamin yang menjadi pertimbangan.

4. Metodologi Indeks Pembangunan Gender

Indeks komposit IPG terdiri dari dimensi dan indikator indeks pembangunan manusia yang berdasarkan sisi laki-laki dan perempuan. adapun yang membedakan komposisi indeks komposit antara IPM dengan IPG yaitu terletak pada batasan minimum dan maksimum pembentuk dimensi. Berikut batas minimum dan maksimum indikator pembentuk IPG:

Tabel 2.1
Batas Minimum & Maksimum Pembentuk Dimensi IPG

| Dimensi/Indikator | | Minimum | | Maksimum | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan |
| Umur Panjang & Hidup Sehat | Umur Harapan Hidup (UHH) | 17,5 | 22,5 | 82,5 | 87,5 |
| Pengetahuan | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 0 | 0 | 18 | 18 |
| | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Standar Hidup Layak | Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rupiah Setahun) | 1.007.436 | | 26.572.352 | |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Nilai maksimum dan minimum dalam komponen IPM metode baru telah terstandarisasi oleh *United Nations Development Programme*. Adapun rumus untuk menghitung nilai IPM laki-laki dan IPM perempuan menggunakan metode agresi yaitu menggunakan rata-rata geometrik. Rumus IPM laki-laki dan IPM perempuan sebagai berikut sebagai berikut:¹³

IPM_L:

 $\sqrt[3]{Indeks\ UHH_L \times\ Indeks\ Pengetahuan_L \times\ Indeks\ Pendapatan_L}$

-

¹³ Statistik, *Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten 2019*, ..., h. 21.

IPM_P:

 $\sqrt[3]{Indeks\ UHH_P \times Indeks\ Pengetahuan_P \times Indeks\ Pendapatan_P}$

Penggunaan rata-rata geometrik pada metode penghitungan IPG ini dapat menjelaskan keadaan ketimpangan. Untuk menghitung IPG dengan metode baru dihitung berdasarkan rasio yang berasal dari rumus berikut:

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L}$$

Untuk menginterpretasikan nilai IPG. dapat diketahui dengan melihat semakin kecil jarak nilai IPG dengan nilai 100, ini menjelasan bawa semakin setara pencapaian pembangunan potensiatau kemampuan antara kaum laki-laki dengan perempuan. kemudian, jika nilai IPG memiliki jarak yang semakin besar dengan nilai 100, ini menjelaskan bahwa telah terjadi ketimpangan pembangunan potensi ataupun kapabilitas antara laki-laki dan perempuan.¹⁴

¹⁴ Sari, Sarfiah, dan Indrawati, "Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2011 - 2017 (Studi asus 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah)," ..., h. 469.

5. Konsep Gender dalam Perspektif Ekonomi Islam

Bias gender pada masa pra Islam sangat menakutkan dan memprihatinkan, dimana perempuan dianggap sebagai manusia yang tidak berguna, lemah dalam berfikir, tidak memiliki pengetahuan tentang agama serta dianggap tidak berpotensi dalam bidang pekerjaan dan politik dibandingkan dengan laki-laki, sehingga pada saat itu dikenal dengan zaman *jahiliyah*.

Pada zaman *jahiliyah*, ajaran agama tidak dipedulikan yang menyebabkan tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan, seperti tindakan memperjualbelikan perempuan dijadikan budak hingga memberikan hak kepada anak-anak laki-laki untuk mewarisi istri dari ayahnya (yaitu ibunya sendiri). Pada masa *jahiliyah* bayi perempuan dibunuh ataupun dikubur hidup-hidup, dengan anggapan perempuan tidak dapat ikut berkontribusi untuk masa depan bangsa. Kisah ini sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم باللُّفَنَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ و مُسُوِّداً وَهُوَ كَظِيمٌ ٨٠ يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوِّءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ٓ ۚ أَيُمْسِكُهُ و عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ و فِي ٱلتُّرَابُّ أَلَا سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ٥٠

Artinya:

"Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah (58). Dia bersembunyi dari oang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu (59)." (QS. An-Nahl [16]: 58 - $59)^{15}$

Kemudian pada akhirnya Islam datang membawa ajaran untuk memperbaiki dan membangun moralitas manusia dan ketidakadilan yang terjadi. Islam memandang perempuan sebagai karunia dari Allah Swt. Rasulullah Saw mengajarkan prinsip persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, tidak ada diskriminasi dan marginalitas antara keduanya. Sehingga perempuan dapat aktif dalam kegiatan dakwah, aktivitas politik, ekonomi dan lainnya.

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Our'an dan Terjemahnya (Depok: Al-Huda, 2002), h.273.

Islam menjamin hak-hak yang harus diterima baik bagi laki-laki maupun perempuan. Islam menjamin hak atas agama, harta, akal, kehormatan serta jiwanya untuk dilindungi oleh Agama Islam. al-Qur'an menerangkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk beribadah serta meraih pahala, seperti firman Allah Swt sebagai berikut:

Artinya:

"Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun." (QS. An-Nisa [4]: 124)¹⁶

Secara umum terlihat bahwa al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan ini bukanlah tindakan diskriminasi yang merugikan salah satu pihak. Perbedaan ini bertujuan untuk menciptakan relasi yang harmonis yang didasari kasih

 $^{^{16}}$ Departemen Agama RI, $Al\mbox{-}Qur\mbox{'an dan Terjemahnya},...,$ h. 98.

sayang di lingkungan keluarga hingga kedamaian yang ideal di suatu negeri.¹⁷

Kaum laki-laki dan perempuan saling bersinergi dalam menegakkan *amar ma'ruf nahyi munkar* di lingkungan masyarakat hingga negara secara keseluruhan. Islam menempatkan perempuan sebagai makhluk mulia yang perlu dijaga. Dengan demikian Allah Swt menetapkan berbagai aturan untuk melindungi, memuliakan, serta sebagai pedoman bagi perempuan dalam melaksanakan peran strategis sebagai pendidik umat generasi masa depan.¹⁸

Kesempatan yang sama perempuan dan laki-laki berkaitan dengan kesamaan hak dan kewajiban. Meskipun pada dasarnya ada beberapa hal yang tidak perempuan dapat lakukan dan sebaliknya. Namun terlepas dari itu

¹⁷ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam," *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* Vol. 13, no. 2 (2013): h. 378.

¹⁸ Ilfa Harfiatul Haq, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam," *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* Vol. 05, no. 1 (2019): h. 87.

semua, yang membedakan derajat antara laki-laki dan perempuan yaitu tingkat ketakwaat terhadap Allah Swt.

Kesempatan yang sama atas hak yang diberikan hukum Islam menandakan bahwa seorang perempuan memiliki kemampuan, kemandirian, identitas ekonomi serta hak-hak ekonomi, seperti hak mendapatkan mas kawin (mahar) yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, hak atas klaim waris, dan hak bekerja dan memperoleh penghasilan.¹⁹

a. Gender Menurut Nasaruddin Umar

Konsep gender menurut Nasaruddin Umar dalam Meiliarni Rusli, beberapa prinsip — prinsip mengenai kesetaraan gender berdasarkan al-Qur'an yaitu:²⁰

Laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah
 Swt. Yang keduanya memiliki potensi serta

¹⁹ H Damarwati dan Anggriani Alamsyah, "Gender dan Ekonomi," Alwardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Vol. 12, no. 1 (2018): h 7

²⁰ Meiliarni Rusli, "Konsep Gender Dalam Islam," *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* Vol. 1, no. 2 (2011): h. 156.

- peluang yang sama untuk menjadi sebaik-baik hamba Allah Swt.
- 2) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang sama dalam menjalankan tugas-tugas menjadi khalifah di bumi.
- 3) Laki-laki dan perempuan telah menerima perjanjian awal dengan Allah Swt. Yaitu ikrar ketuhanan atas keberadaan Allah yang disaksikan para malaikat. al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah sangat memuliakan seluruh anak cucu adam tanpa membedakan jenis kelamin.
- 4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam Drama Kosmis. Yaitu cerita mengenai kondisi Adam dan Hawa di Surga hingga keluar ke bumi. Islam menegaskan bukan hanya hawa yang terlibat dalam peristiwa keluarnya Adam dari surga, namun adam juga ikut aktif terlibat atas bujuk rayu iblis. Perempuan dipandang membawa beban

"dosa warisan" dengan menyudutkan Hawa seperti yang dikesankan Yahudi dan Kristen.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa perempuan dan lakilaki dilahirkan sama, memiliki kesempatan yang sama
dalam hak kepemilikan, bekerja, memilih pasangan hidup,
mengklaim hak waris, mendapatkan pendidikan dan
diperlakukan dengan terhormat. Islam membangun potensi
perempuan dengan memberikan keistimewaan yang
membahas mengenai hak-hak perempuan dalam Qur'an
Surat An-Nisa. Ajaran Islam telah mengangkat derajat
perempuan pada posisi yang layak untuk dihargai dan
membangun karakter perempuan sehingga dapat bersinergi
dengan kaum laki-laki untuk meningkatkan aspek
pembangunan manusia diberbagai aspek kehidupan.

b. Gender Menurut Mansour Fakih

Agama sering dijadikan kambing hitam atas terjadinya diskriminasi gender yang seakan memberikan batasan kepada kaum perempuan. Yang seharusnya dipahami ialah bagaimana paradigma tersebut dapat

berkembang, apakah berasal dari sumber agama, atau berangkat dari pemahaman, penafsiran maupun pemikiran yang berkembang disertai pengaruh dari budaya patriarki, kapitalis atau ideologi lainnya.

Menurut Mansour Fakih prinsip ideal Islam memposisikan perempuan dan laki-laki dalam kedudukan yang sama, keduanya diciptakan dari satu *nafs* (entitas hidup).²¹ Laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan, begitupun sebaliknya. Persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan tercermin dari dalam hak ekonomi, seperti hak memiliki harta kekayaan baik yang berasal dari hasil usaha maupun dari pewarisan. Dengan demikian mahar diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya bukan diperuntukan bagi orang tua.

Gender sebagai hasil dari konstruksi kultur, sehingga ada beberapa tradisi dan penafsiran agama yang memposisikan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki.

 21 Fakih, $Analisis\ Gender\ \&\ Transformasi\ Sosial,$ h. 129.

Karena gender sebagai peranan hasil konstruksi kultur, maka dapat berubah seiring perkembangan waktu, maka persepsi mengenai batasan yang memarginalisasi kaum perempuan di sebagian masyarakat telah ditinggalkan dan sebagian lainnya masih dipertahankan.²²

Penafsiran maupun interpretasi suatu ajaran agama dipengaruhi oleh cara pandang yang digunakan penafsirnya sesuai dengan pemahaman maupun ideologi yang dianut. Interpretasi penafsiran ajaran agama berkaitan satu sama lain dengan berbagai dimensi kehidupan baik aspek ekonomi, sosial, politik, budaya hingga ideologi.

c. Gender Menurut Fatimah Mernissi

Fatimah Menissi berpandangan bahwa agama Islam memberi kebebasan kepada kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan publik seperti memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan lainnya.²³ al-Qur'an

²² Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, h. 131.

²³ Mohc Choiri dan Alvan Fathony, "Rekonstruksi Tafsir Kebebasan Perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Pemikiran Zaitunah Subhan dan

menerangkan bahwa meskipun manusia terdiri dari berbagai etnis, bangsa yang berbeda dari jenis, warna kulit, bahasa hingga perbedaan kondisi geografi, semua itu sama dan setara di hadapan Allah Swt.

Sistem perbudakan yang hadir dan berlaku jauh sebelum Islam datang. Sehingga ketika Islam datang dan membawa perbaikan konstruksi sosial pada masyarakat dengan memperlakukan budak dengan setara membebaskannya, dianggap sebagai transformasi sosial yang radikal. Fatima Mernissi berpandangan bahwa penolakan atas transformasi sosial tersebut menggambarkan bahwa keadaan kesetaraan budak dengan manusia yang merdeka berdampak pada aspek ekonomi.²⁴ Praktik perbudakan mengancam kepentingan ekonomi berbagai pihak yang berkaitan, karna persepsi bahwa jika

-

Fatimah Mernissi," *Jurnal Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Diaologis Ilmu Ushuluddin* 11, no. No. 1 (2021): h. 37.

²⁴ Mohc Choiri dan Alvan Fathony, "Rekonstruksi Tafsir Kebebasan Perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Pemikiran Zaitunah Subhan dan Fatimah Mernissi,"..., h. 38.

memerdekakan budak berarti seseorang akan mengalami kerugian atas kehilangan salah satu harta yang dimiliki.

Pemahaman bahwa laki-laki berperan dalam ranah publik dan perempuan berperan dalam wilayah domestik sebagai pemahaman yang perlu dikaji berdasarkan konteks historisnya. Keberadaan perempuan dilindungi dengan pengenaan hijab dan bukan sebagai pembatasan kebebasan wanita. Anjuran mengenakan hijab akan melindungi kehormatan wanita sehingga kondisinya terjaga ketika beraktivitas di lingkungan publik.

d. Gender Menurut Amina Wadud

Amina Wadud konsisten dalam memperjuangkan kesetaraan serta keadilan bagi perempuan. Amina wadud berpandangan bahwa keadilan merupakan hak manusia yang telah dijamin oleh Allah Swt. Pemikiran feminisme Amina Wadud berpusat pada masalah keberadaan, hak serta peranan perempuan dalam al-Qur'an.²⁵

²⁵ Mardety Mardinsyah, *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender dalam Islam* (Bandung: PT. Lontar Digital Asia, 2018), h. 39.

Pemikiran Amina Wadud pada dasarnya sebagai suatu penegasan bahwa perempuan adalah manusia yang utuh. Sehingga pemikirannya menolah budaya patriatikal terhadap perempuan. Amina wadud berpandangan bahwa adanya ketimpangan gender dalam masyarakat Islam disebabkan penafsiran al-Qur'an yang dipengaruhi oleh budaya patriarki yang melegalkan adanya penindasan terhadap perempuan.²⁶ Al-Qur'an tidak membedakan derajat antara laki-laki dan perempuan, manusia diciptakan berpasangan secara serata dan sederajat. Manusia memiliki potensi yang sama untuk mencapai kesejahteraan.

B. Konsep Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Menurut Arditho Bhinadi kemiskinan merupakan suatu kondisi yang mendeskripsikan ketiadaan kepemilikan diikuti tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang seharusnya dimiliki setiap manusia seperti sandang,

²⁶ Mardety Mardinsyah, Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender dalam Islam,..., h. 40.

pangan dan papan serta rendahnya pendapatan yang diperoleh.²⁷

Dalam pandangan Shirazi dan Pramanik dikutip oleh Syauqi Beik, kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dihadapi oleh seseorang yang tidak memiliki kecukupan sumber daya demi memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, yang dilihat dari segi ekonomi, sosial, psikologi maupun spiritual.²⁸ Kemiskinan sebagai perwujudan dari keterbelakangan masyarakat, yang perlu diatasi dengan upaya-upaya pendidikan dan modernisasi.²⁹

Menurut BPS dalam publikasi tahunannya menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi dasar makanan dan bukan makanan yang dihitung berdasarkan

²⁸ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 68.

²⁷ Arditho Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 9.

²⁹ Itang, "Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan," *Tazkiya* Vol. 16, no. 01 (2015): h. 4.

pengeluaran.³⁰ Tingkat kemiskinan diukur dengan menghitung Garis Kemiskinan yang terdiri atas 2 kategori yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan regional yaitu daerah perkotaan dan pedesaan. Adapun definisi dari penduduk miskin adalah penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bahwah garis kemiskinan.

Menurut Denny Sankaen dkk, secara umum standar hidup masyarakat bukan hanya berpacu pada terpenuhinya kebutuhan pangan, namun juga perlu diiringi dengan jaminan kesehatan dan pendidikan yang dapat diakses siapapun tanpa terkecuali.³¹ Kemudian didukung oleh pemukiman yang layak huni sebagai standar kesejahteraan masyarakat.

³⁰ Badan Pusat Statistik, *Provinsi Banten Dalam Angka 2020* (Banten: BPS Provinsi Banten, 2020), h. 117.

³¹ Denny Sangkaen, Vecky A. J. Masinambow, dan Daisy S. M. Engka, "Analisis Pengaruh Inflasi Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Manado," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* Vol. 19, no. 2 (2018): h. 21.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi individu ataupun kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan kebutuhan untuk memenuhi fundamentalnya, seperti ketidakmampuan mencukupi kebutuhan konsumsi, menjangkau akses sumber daya sosial ekonomi, menjangkau akses pendidikan dan kesehatan, tidak mampu bersikap terampil dan mandiri, serta ketidakberdayaan lainnya.

2. Penyebab Kemiskinan

Menurut Cox dalam Bhinadi, penyebab kemiskinan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor tunggal dan terbagi dalam berbagai dimensi penyebab kemiskinan, diantaranya:³²

a. Kemiskinan disebabkan globalisasi

Pengaruh globalisasi menciptakan persaingan antar berbagai negara. Negara-negara maju sebagai negara

32 Bhinadi, Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta, ..., h. 12.

pemenang pertaruhan globalisasi, dan negara-negara berkembang sebagai negara yang kalah dalam pertaruhan globalisasi akan terpinggirkan dan berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di negara-negara sedang berkembang.

b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan Kebijakan pembangunan yang diaplikasikan pada suatu negara, secara langsung maupun tidak akan berdampak pada terbentuknya masyarakat miskin, seperti kemiskinan dipedesaan karena tidak terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menyebabkan ketimpangan. Kemiskinan perkotaan yang disebabkan oleh kecepatan pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi perubahan pada struktur-struktur penunjang pembangunan, ini pun dapat melahirkan masalah ketimpangan pembangunan.

c. Kemiskinan sosial

Kemiskinan yang terjadi akibat kondisi masyarakat yang tidak berpihak pada beberapa kelompok masyarakat. Seperti kemiskinan pada perempuan, anak-anak, kelompok minoritas yang menyebabkan ketimpangan gender, diskriminasi, marginalisasi ekonomi dan lainnya.

d. Kemiskinan konsekuensial

Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti terjadinya konflik perang, bencana alam, kerusakan lingkungan hidup, peningkatan ataupun perubahan demografi sehingga dapat menyebabkan kemiskinan konsekuensial.

Penyebab kemiskinan seperti globalisasi, perekonomian global, kebijakan pembangunan yang tidak seimbang, serta penyebab kemiskinan dari faktor eksternal berpengaruh pada bentuk pembangunan suatu negara, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasinya sesuai dengan penyebab masalah tersebut. Adapun penyebab terjadinya kemiskinan lainnya yaitu:³³

³³ Shidiq Ramdan Dinata, Mahendra Romus, dan Yanti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2003 - 2018," *Jurnal Al-Iqtishad Edisi 16* Vol. 2 (2020): h. 120.

a. Taraf pendidikan yang rendah

Taraf pendidikan yang rendah berdampak pada ketidakmampuan dalam mengembangkan diri secara personal sehingga mengakibatkan sulitnya mendapat pekerjaan pada lapangan kerja yang tersedia.

b. Tingkat kesehatan yang rendah

Kesehatan sebagai faktor fundamental yang perlu dimiliki setiap individu. Jika kesehatan dan kecukupan gizi seseorang tidak terpenuhi maka akan menyebabkan rendahnya kekuatan fisik dan pikiran seseorang.

c. Lapangan kerja yang terbatas

Lapangan pekerjaan sangat diperlukan sebagai sarana untuk mendapatkan pendapatan yang layak. Maka ketersediaan lapangan pekerjaan diperlukan untuk memutus lingkaran kemiskinan.

d. Kondisi keterisolasian

Kemiskinan berdampak pada keterisolasian masyarakat dan hidup pada wilayah terpencil, sehingga

sulit menjangkau akses pendidikan, kesehatan, teknologi, keuangan dan lainnya.

Masyarakat miskin memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat melalui beberapa aspek, berikut ciri-ciri masyarakat miskin menurut Fernandez dalam Arsyad, yaitu:

- Aspek politik, masyarakat tidak dapat menjangkau akses menuju proses pengambilan keputusan mengenai kehidupan mereka.
- Aspek sosial, tersisih dari lembaga utama masyarakat yang ada.
- c. Aspek ekonomi, redahnya kapablitas SDM, termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berpengaruh pada rendahnya penghasilan. Rendahnya kepemilikan seperti aset lingkungan hidup termasuk air bersih dan fasilitas penerangan.
- d. Aspek budaya atau nilai, terjerat pada rendahnya budaya etos kerja, kualitas berpikir yang rendah, budaya malas dan mudah menyerah.

Permasalahan kompleks mengenai kemiskinan masih terus dalam pembenahan, dengan tujuan pembangunan nasional yang adil dan merata demi terbentuknya masyarakat yang sejahtera.

3. Macam-Macam Kemiskinan

Terdapat beberapa macam bentuk dari kemiskinan diantaranya:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut merupakan suatu keadaan apabila tingkat pendapatan berada di bawah garis batas kemiskinan. Kemiskinan absolut dapat menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dalam perhitungan kemiskinan absolut tidak terlepas dari kesulitan yang dihadapi, yaitu sulit menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena banyak faktor yang mempengaruhinya seperti keadaan geografis, demografi, faktor sosial ekonomi lainnya.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi kemiskinan yang terjadi dikarenakan kemiskinan dipengaruhi keadaan sekitarnya. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, dan akan selalu ada. Garis kemiskinan akan berubah jika terjadi perubahan pada pola kehidupan masyarakat, dikarenakan kebijakan pembangunan tidak selalu merata yang berdampak pada ketimpangan distribusi pendapatan.

c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan kondisi kemiskinan baik yang terjadi secara langsung maupun tidak disebabkan oleh struktur sosial dalam masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah terkadang menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang disebabkan karena struktur sosial menyebabkan terisolasinnya kelompok masyarakat tertentu dan dapat menciptakan generasi miskin di masa depan. Kemiskinan struktural

dapat diatasi jika adanya proses perubahan struktur utama masyarakat.

d. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merupakan kondisi kemiskinan yang berhubungan dengan sikap individu maupun kelompok masyarakat yang tidak memiliki kemauan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut, meskipun banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan bantuan. Kemiskinan ini dapat disebabkan karena faktor adat suatu daerah yang membelenggu masyarakat tersebut.

Kemiskinan sebagai suatu keadaan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan hidupnya memenuhi kebutuhan dengan baik dan manusiawi sulit melakukan memang untuk pengukurannya, maka diperlukan indikator yang tepat untuk mengukurnya.

4. Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan diukur sesuai dengan norma-norma yang berlaku di suatu daerah. Pemilihan norma ini diperuntukan untuk mengukur kemiskinan dari sisi konsumsi. Garis kemiskinan berdasarkan konsumsi terdiri atas dua aspek yaitu:³⁴

- Pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi standar gizi minimum dan kebutuhan pokok.
- b. Jumlah kebutuhan lain yang bervariasi yang mendeksripsikan biaya partisipasi pemenuhan kebutuhan yang diperlukan masyarakat disetiap harinya.

Konsep pengukuran kemiskinan menurut BPS didasari pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya (basic needs). Konsep ini melihat kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dihitung

_

³⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Ekonomi Makroekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 237.

berdasarkan pengeluaran.³⁵ Dengan demikian BPS mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri atas dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kewilayahan yaitu daerah perkotaan dan pedesaan dikarenakan adanya perbedaan harga barang yang dapat menentukan batas ataupun garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran masyarakat dari 52 komoditi dasar makanan atas kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita dalam sehari. Adapun Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan kebutuhan minimum masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan, akses pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya.

-

³⁵ Badan Pusat Statistik, *Provinsi Banten dalam Angka 2019* (Banten: BPS Provinsi Banten, 2019), h. 106.

³⁶ Badan Pusat Statistik, *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), h. 4.

Adapun pengukuran tingkat kemiskinan menurut Sajogyo, kemiskinan dapat diukur berdasarkan tingkat mengkonsumsi beras.³⁷ Kategori kemiskinan berdasarkan konsumsi beras dikategorisasikan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok masyarakat melarat, sangat miskin dan miskin. Seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Kategori Tingkat Kemiskinan Menurut Sajogyo

| Kategori | Pedesaan | Perkotaan |
|----------|----------|-----------|
| Melarat | 180 kg | 270 kg |
| Sangat | 240 kg | 360 kg |
| Miskin | 2 10 Kg | 300 Kg |
| Miskin | 320 kg | 480 kg |

Namun kategori melarat pada tahun 1979 diganti menjadi kategori nyaris miskin, yaitu dengan konsumsi beras di daerah pedesaan sebanyak 480 kg dan daerah perkotaan sebanyak 720 kg per kapita dalam setahun.

_

³⁷ Arsyad, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kelima*, h. 303.

5. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan dapat diupayakan melalui perbaikan pada setiap sektor yang bermasalah terkait penyebab kemiskinan. Kebijakan yang diciptakan perlu disesuaikan dengan konteks permasalahan inti agar lebih tepat sasaran serta tidak menimbulkan permasalahan baru. Berikut beberapa strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Alat kebijakan penting yang dibangun untuk memperbaiki keadaan kemiskinan yaitu pembangunan sumber daya manusia yang ditinjau dari perbaikan terhadap akses konsumsi dan pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan peningkatan gizi. 38 Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Perbaikan yang diupayakan tersebut membutuhkan peran dari manusia sebagai investasi

³⁸ Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*, ..., h. 307.

terbaik dalam pembangunan. Telah diketahui bahwa pendidikan baik secara formal seperti sekolah maupun informal seperti pelatihan terkait keterampilan berpengaruh terhadap pengendalian kemiskinan dalam jangka panjang. Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas dan tepat guna.

Masyarakat miskin perlu hidup mandiri dan tidak ketergantungan oleh bantuan orang lain, maka dengan pelatihan keterampilan dapat meningkatkan produktivitas yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan mereka. Masyarakat berhak atas kesempatan yang sama untuk dapat hidup sehat, menghilangkan penyebab keterisolasian masyarakat miskin baik yang disebabkan wilayah tempat tinggal maupun keterisolasian dalam mental dan budaya miskin.

Pemerintah dengan berbagai kebijakannya mampu untuk andil dalam memperbaiki fasilitas dan struktur kesehatan masyarakat miskin. Perubahan demografi yang biasa disebabkan oleh kematian bayi dan anak-anak disebabkan oleh kemiskinan yang diderita masyarakat karena sulitnya akses kesehatan. Maka dengan adanya perbaikan kesehatan merujuk pada peningkatan produktivitas masyarakat miskin dapat meningkatkan daya kerja masyarakat untuk menghasilkan pendapatan yang diperuntukan untuk kebutuhan kesehatannya.

Strategi kebijakan dan prioritas yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan perlu melihak konteks kewilayahan seperti perkotaan dan pedesaan, karena adanya penyebab dan masalah kemiskinan yang berbeda baik dalam kebutuhan prioritas maupun kelembagaannya. Masalah kemiskinan yang dialami oleh penduduk pedesaan berkaitan dengan kebutuhan air bersih dan sanitasi. Adapun masalah kemiskinan yang dialami penduduk perkotaan seperti pendapatan rendah, lingkungan yang kotor, penyediaan perumahan yang layak dan sehat

sehingga mengurangi jumlah tunawisma, penyediaan air bersih dan lainnya.

b. Pembangunan Bidang Pertanian dan Pedesaan

Indonesia sebagai negara agraris dengan sektor pertanian yang luas, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Indonesia sebagai negara pengimpor beras terbesar di dunia, ini merupakan kenyataan yang sangat disesalkan.

Perbaikan pembangunan yang diupayakan telah memperoleh hasilnya secara berkesinambungan. Namun sektor pertanian masih dalam keadaan tertinggal, ini sebabkan rendahnya nilai jual dipasaran yang merugikan petani dan penghasilan petani menjadi penghasilan terendah dibandingan dengan penghasilan profesi lain. Kehidupan petani yang tertinggal diiringi dengan akses penyaluran aspirasi yang terbatas, menjadikan petani tidak mampu untuk menyuarakan rasa ketidakadilan yang dialaminya.

-

³⁹ Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima,...*, h. 308.

Sumbangan peran pertanian untuk meningkatkan pendapatan pedesaan dan menanggulangi kemiskinan memiliki prospek yang besar. Kebijakan revolusi teknologi pertanian baik pertanian padi maupun pertanian tanaman keras seperti kelapa sawit, karet dan kelapa dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah pedesaan ataupun sektor pertanian.

c. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga swadaya masyarakat bersifat independen, fleksibel, mandiri dan berpengetahuan dapat menjangkau dan merangkul penduduk miskin dengan efektif. Perancangan dan penerapan program pengentasan kemiskinan berimplikasi pada meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat untuk memperoleh pendapatan melalui kegiatan-kegiatan keterampilan.

Upaya penanggulangan kemiskinan masih terus diupayakan ditandai dengan kebijakan pemerintah menciptakan program penanggulangan kemiskinan bagi penduduk miskin. Berikut program pemerintah dalam menggulangi kemiskinan.

a. Kartu Keluarga Sejahtera

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah alat untuk menyalurkan bantuan sosial dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. 40 Kartu Keluarga Sejahtera dilengkapi dengan kemampuan untuk merekan data penduduk yang menerima bantuan sosial dan tabungan elektronik. KKS juga berfungsi untuk mengambil bantuan pemerintah bagi penerima Program Keluarga Harapan melalui ATM atau agen bank yang ditetapkan.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program
 Sembilan Bahan Pokok (Sembako)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial dari pemerintah berupa pangan nontunai yang diperuntukan bagi Keluarga

⁴⁰ Badan Pusat Statistik, *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2020* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), h. 47.

Penerima Manfaat (KPM).⁴¹ Keluarga penerima manfaat ini akan mendapatkan bantuan bulanan sebesar Rp 110.000,- berbentuk e-voucher dari bank penyalur. Bantuan e-voucher ini digunakan untuk membeli bahan pokok seperti beras, telur dan lainnya sesuai yang dibutuhkan KPM yang dapat dibeli di e-warong.

Program BPNT adalah program peralihan dari Program Rastra. BPNT dilakukan bertahap dimulai tahun 2017 di 44 kota yang ditetapkan dan memiliki akses dan layanan yang mumpuni. Untuk wilayah kabupaten/kota lainnya masih mengaplikasikan program bantuan sosial Rastra. Pada tahun 2020 BPNT mengalami perkembangan menjadi program sembako dengan bantuan sebesar Rp 150.000,- per bulan. Program sembako merujuk pada pemenuhan

⁴¹ Badan Pusat Statistik, Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2020,..., h. 48.

kebutuhan gizi seperti makanan yang mengandung sumber karbohidrat dan protein.

c. Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar biasa disingkat dengan PIP, adalah program bantuan dibidang pendidikan dengan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak di Indonesia yang berusia 6 hingga 21 tahun untuk bersekolah yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin sesuai dengan persyarakat yang telah ditetapkan. Bantuan ini didapat melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi penduduk yang berhak menerimanya.

d. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan telah berlangsung sejak tahun 2007 sebagai langkah yang diambil pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan sosial bagi keluarga miskin yang kemudian ditunjuk

sebagai keluarga penerima manfaat dari PKH.⁴²
Penerima manfaat PKH dapat mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan di lingkungan mereka, terlebih pendidikan untuk anak-anak sekolah dan jaminan fasilitas kesehatan untuk menjaga kesehatan ibu hamil.

Manfaat dari PKH pun diperuntukan bagi penyandang disabilitas dan penduduk yang lanjut usia dengan harapan dapat menyelamatkan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat UUD dan kebijakan pembangunan berkelanjutan pemerintah.

Kemiskinan yang bersifat multi dimensi, maka strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan bukan hanya memfokuskan diri pada sisi ekonomi namun perlu juga memperhatikan sisi non ekonomi. Pengentasan kemiskinan dari sisi non ekonomi seperti menghilangkan sifat apatis, mental dan budaya miskin, sifat malas, tidak

42 Badan Pusat Statistik, Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2020,..., h. 50.

berpartisipasi pada politik, dan lainnya. Pengentasan kemiskinan akan sulit diselesaikan jika tidak mampu menyelesaikan budaya atau perilaku tersebut. Selain itu strategi penanggulangan kemiskinan perlu berorientasi pada strategi pemberdayaan masyarakat.

6. Konsep Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Kemiskinan menurut Al-Ghazali

Kemiskinan bagi Al-Ghazali dalam Nurul Huda, adalah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Al-Ghazali mengkategorikan kemiskinan menjadi dua bagian yaitu kemiskinan atas kebutuhan material dan kemiskinan atas kebutuhan rohani. Kemiskinan materil yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor ekonomi yakni ketidakcukupan pendapatan dalam membiayai kebutuhan diri dan keluarga. Adapun kemiskinan spiritual yaitu kondisi kemiskinan yang

-

⁴³ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2015), ..., h. 23.

disebabkan kurang tepatnya pengetahuan dan pemahaman agama, atau ada unsur kesengajaan untuk meninggalkan ajaran agama dikarenakan pengaruh hawa nafsu serta pandangan sekularisme dan liberalisme terhadap agama.

Dalam pandangan Islam, kemiskinan terbagi atas 3 bagian yaitu:⁴⁴

- a. Miskin iman, yaitu manusia yang dalam jiwanya tidak berkoneksi dengan Allah Swt, atau hanya ingat kepada Allah Swt saat mengalami kesulitan. Hal ini berarti manusia ini tidak memiliki rasa sayang kepada Allah, sehingga Allah biarkan mereka dalam keadaan terombang-ambing, tidak ada panduan dan akan mengalami kesengsaraan.
- b. Miskin ilmu, ilmu pengetahuan merupakan modal untuk menjalani kehidupan yang layak. Keadaan miskin ilmu dapat menjadikan seseorang

⁴⁴ Arif, Teori Ekonomi Makroekonomi Islam, ..., h. 231.

mengalami kesulitan dan kebingungan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi.

c. Miskin harta, yaitu keadaan seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya baik sandang, pangan maupun tempat tinggal, mengalami keterisolasian, dan tidak mampu meraih akses perekonomian, kesehatan dan pendidikan.

Islam memandang bahwa fakir miskin wajib dibantu. Perspektif Islam memandang bahwa fakir adalah suatu kondisi seseorang serba mengalami kekurangan dan tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya, seperti orang tua yang sudah tidak mampu bekerja. Adapun miskin adalah kondisi seseorang yang sudah berkerja dan berusaha, namun belum mencukupi kebutuhan pokok dan kebutuhan pendamping hidupnya.

b. Kemiskinan Menurut Yusuf Qardhawy

Menurut Yusuf Qardhawy, kemiskinan merupakan kondisi yang membahayakan akidah, akhlak, penalaran dan kelogisan dalam berfikir, membahayakan lingkungan keluarga dan masyarakat. Islam menganggap kemiskinan sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Dimana seorang muslim harus segera memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya.

Kemiskinan yang semakin menguasai, akan menjadikan kemiskinan *mansiyyan* yaitu kemiskinan yang mampu melupakan Allah dan juga sifat kemanusiannya). Kemiskinan mansiyyan juga bagaikan orang kaya yang sangat merajai, maka akan menjadikan kekayaan yang mathgiyyan yaitu kekayaan yang dapat menjadikan seseorang bertindak zalim, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 15.

Islam mengharapkan setiap umat manusia agar dapat mempersiapkan kehidupan terbaiknya dengan mendayagunakan sumber daya seoptimal mungkin. Dengan terwujudnya rasa kebahagiaan dan rasa aman atas pencapaian pada segala aspek kehidupan, maka manusia akan mampu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan penuh kesungguhan.

Keberadaan fakir miskin haruslah diakui keberadaannya, dengan memperhatikan serta menjaganya untuk memperbaiki kehidupan dan kehormatannya. Allah Swt mewajibkan zakat dan menjadikannya dasar atas pembentukan tatanan masyarakat yang mandiri. Allah Swt mewajibkan zakat bagi pihak yang mampu untuk diberikan kepada fakir miskin, sehingga dapat membantu kesulitannya dalam memenuhi kebutuhan materi. Dengan demikian fakir miskin dapat ikut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan dengan tetap beribadah kepda Allah Swt.

Menurut Yusuf Qardhawy terdapat beberapa langkah upaya pengentasan kemiskinan, yaitu:

- menggerakan kaum miskin untuk bekerja dengan memberikan motivasi serta memberikan lapangan pekerjaan.
- 2) Mengupayakan jaminan yang berasal dari kerabat yang berkecukupan untuk turut menbantu kerabat yang berkekurangan.
- 3) Mengoptimalkan pemungutan dan pendistribusian zakat, terdapat jaminan dari kas negara negara (*baitul mal*), mewajibkan beberapa pemungutan lain di luar zakat bagi kaum muslim.
- 4) Menganjurkan sedekah yang bersifat sukarela.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan dilakukan berdasarkan penyebab yang memicu berkembangnya kemiskinan, sehingga kemiskinan diselesaikan langsung pada akarnya. Kemiskinan yang disebabkan karena pengangguran, sikap malas bekerja,

etos kerja yang rendah serta kurangnya usaha untuh menghasilkan pendapatan akan berbeda penanganannya dengan kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan dalam bekerja atau ketidakmampuan untuk menutupi semua kebutuhan dengan pendapatan yang telah diusahakan.

Dana zakat dapat dipergunakan untuk memberikan pengajaran dan melatih kemampuan serta keterampilan penduduk miskin sesuai dengan minat, bakat ataupun potensi yang dimiliki. Dana zakat dapat digunakan dalam rangka memberdayakan potensi manusia untuk meningkatkan produktivitas manusia, sehingga penduduk miskin dapat hidup mandiri secara bertahap.

Adapun dana zakat tidak dapat diberikan pada seseorang yang mampu bekerja. Namun seorang yang mampu bekerja namun belum mendapatkannya (pengangguran) maupun seseorang yang mendapatkan pekerjaan namun pekerjaan tersebut tidak sesuai kedudukannnya dalam pandangan masyarakat atau

dapat membebani diluar kemampuannya, maka orang tersebut boleh mendapatkan dana zakat.

c. Kemiskinan Menurut Syauqi Beik

Pandangan Syauqi Beik mengenai kemiskinan dalam ekonomi Islam, menjelaskan perbedaan dimiliki pendapatan yang setiap orang yang menyebabkan kondisi kemiskinan merupakan sunatullah.46 Sehingga Islam tidak membahas mengenai bagaimana cara untuk mengentaskan kemiskinan. Namun Islam berupaya untuk mengurangi kemiskinan agar kesejahteraan dapat dimiliki, yaitu dengan saling tolong menolong, bersilaturahmi, saling mengisi dan saling bersinergi antar masyarakat atau inidvidu.

Islam menjadikan orang fakir yang berakhlak mulia salah satu pilar penting dalam pembangunan masyarakat. Terdapat lima pilar yang mampu mendorong keberhasilan pembangunan masyarakat,

.

⁴⁶ Beik dan Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, ..., h. 70.

yaitu ilmu para ulama, pemerintah yang adil, kedermawanan kelompok kaya, doanya orang-orang fakir, serta kejujuran para pegawai.

Islam menegaskan bahwa kemiskinan tidak boleh terjadi karena sifat malas. Orang miskin yang malas berusaha dan berkorban demi memenuhi kebutuhan hidupnya dikecam oleh ajaran Islam. Islam mendidik kepada manusia untuk saling berbagi dan membantu, tak terkecuali orang miskin. Orang miskin juga perlu berinfak sesuai dengan kemampuannya, sehingga kemiskinan bukan alasan untuk bersikap apatis, apalagi kikir.

Artinya:

"(yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan." (QS. Ali Imran [3]: 134)⁴⁷

_

 $^{^{\}rm 47}$ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,..., h. 67.

Islam menekankan kepada pihak terkategorikan untuk memperhatikan, mampu membela dan memberi perlindungan kepada kelompok miskin. Kelompok mampu diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk meminimalisir kemiskinan. Jika kelompok mampu ini mengabaikan kewajibannya membantu kaum miskin, maka al-Quran menyebutnya sebagai pendusta agama.

Artinya:

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (1), maka itulah orang yang menghardik anak yatim (2), dan tidak mendorong memberi makan orang miskin (3)." (QS. Al-Ma'un [107]: 1-3)⁴⁸

Fakir dan miskin termasuk *ashnaf* yang berhak menerima zakat, sesuai dengan firman Allah Swt sebagai berikut

_

 $^{^{48}}$ Departemen Agama RI, $Al\mathchar`-Qur\mathchar`-an\mathchar`-dan\mathchar`-Terjemahnya,..., h. 602.$

ه إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي اللَّهِ وَآبُنِ ٱلسَّبِيلِ اللَّهِ وَآبُنِ ٱلسَّبِيلِ اللَّهِ وَآبُنِ ٱلسَّبِيلِ اللهِ وَآبُنِ ٱلسَّبِيلِ اللهِ عَلِيمٌ مَكِيمٌ مَهَ وَلَيمٌ مَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مَه

Artinya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orangorang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah [9]: 60)⁴⁹

C. Konsep Pengeluaran Per Kapita

1. Definisi Pengeluaran Per Kapita

Bagi Muhammad Abdul Halim dalam Apriansyah, berpandangan bahwa pengeluaran per kapita merupakan biaya konsumsi baik biaya pengeluaran yang diperuntukan bagi barang-barang maupun jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan keseharian yang dikeluarkan seluruh anggota

 $^{^{49}}$ Departemen Agama RI, $Al\mathchar`-Qur'an\ dan\ Terjemahnya,...,$ h. 196.

rumah tangga yang tercatat dalam satu rumah tangga dalam periode tertentu. ⁵⁰

Menurut Baginda Persaulian dkk, pengeluaran konsumsi adalah suatu pembelanjaan yang dilakukan rumah tangga dengan membeli barang-barang akhir maupun jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya serta jenis pelayanan yang dibutuhkan rumah tangga. ⁵¹ Pengeluaran konsumsi seluruh rumah tangga di suatu negara, dapat mencerminkan pengeluaran konsumsi suatu negara.

Pengeluaran per kapita menurut Badan Pusat Statistik yaitu pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk keperluan konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama sebulan, yang kemudian pengeluaran

⁵⁰ Apriansyah Permana, Rustamunadi, dan Dedi Sunardi, "Pengaruh Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Periode 2012 - 2016," *Tazkiya* Vol. 20, no. 01 (2019): h. 4.

⁵¹ Baginda Persaulian, Hasdi Aimon, dan Ali Anis, "Analisis Konsumsi Masyarakat di Indonesia," *Kajian Ekonomi* Vol. 1, no. 02 (2013): h. 2.

_

tersebut dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.⁵² Pengeluaran rumah tangga terbagi atas dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan non makanan yang keduanya saling berkaitan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga baik pengeluaran barang maupun jasa dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti tingkat pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan anggota rumah tangga berbeda.⁵³ maupun selera yang Sehingga iumlah pengeluaran konsumsi antar rumah tangga di suatu negara dipastikan dapat berbeda-beda.

Adapun bagi Rahardia dan Manurung, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai pengeluaran dengan porsi terbesar dalam total pengeluaran agregat. Sehingga memiliki pengaruh yang besar terhadap stabilitas perekonomian suatu negara. Konsumsi pengeluaran rumah

⁵² Badan Pusat Statistik, Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Provinsi

Banten 2019 (Banten: BPS Provinsi Banten, 2020), h. 8. 53 Masykur, Mohd. Nur Syechalad, dan Muhammad Nasir, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Miskin di Kabupaten Aceh Barat," Jurnal Ilmu Ekonomi: Program

Pascasarjana Unsviah Vol. 3, no. 3 (2015): h. 35.

tangga yang bersifat endogenus, menjadikan konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.⁵⁴ Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tannga diantaranya tingkat pendapatan, demografi dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga.

Pengeluaran perkapita yang disesuaikan dapat mendeskripsikan tingkat daya beli (Purchasing Power *Parity*) masyarakat. **Tingkat** daya beli dapat menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi baik untuk makanan maupun non makanan.⁵⁵ Pengeluaran per kapita kemudian mencerminkan kemampuan penduduk untuk mengalokasikan kebutuhan rumah tangga, serta menjadi komponen penting untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan melihat kemampuan

⁵⁴ Prathama Rahardja dan Pengantar Mandala Manurung, *Ilmu Ekonomi* (*Mikroekonomi Dan Makroekonomi*) *Edisi Ketiga* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2016), ..., h. 257.

⁵⁵ Enny Andriany, Asti Harkeni, dan Susi Desmaryani, "Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pengeluaran Per Kapita di Provinsi Jambi," *Prosiding Senantias* Vol. 1, no. 1 (2020): h. 42.

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan berdasarkan pengeluaran.

Hasil dari perhitungan tingkat daya beli dapat membandingkan harga-harga riil antar wilayah, baik antar provinsi maupun kota/kabupaten, karena nilai tukar rupiah dapat menurunkan atau menaikkan tingkat daya beli masyarakat yang dilihat berdasarkan konsumsi perkapita yang disesuaikan.

2. Teori-Teori Pengeluaran Per Kapita

a. Teori Konsumsi Keynes (Keynesian Consumption Model)

John Maynard Keynes berpendapat bahwa pendapatan disposabel (*current disposable income*) dapat mempengaruhi tingkat konsumsi saat ini (*current consumption*). ⁵⁶ Menurut Keynes konsumsi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi otonomus yaitu batas konsumsi minimal yang harus dipenuhi seseorang

⁵⁶ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro* (Serang: Koperasi Syariah Baraka, 2016), h. 42.

walaupun individu tersebut tidak memiliki pendapatan sama sekali. Teori konsumsi ini menyatakan bahwa tingkat konsumsi akan meningkat seiring meningkatnya pendapatan disposabel. Namun peningkatan konsumsi tidak akan sebesar peningkatan disposabel.

Pada teori konsumsi Keynes terdapat variabel riil, yaitu variabel yang menunjukkan hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran konsumsi yang keduanya dinyatakan dengat tingkat harga konstan. Pendapatan yang mempengaruhi pengeluaran untuk konsumsi ini merupakan pendapatan yang terjadi saat ini (current income), dan bukanlah pendapatan yang diperoleh sebelumnya bahkan bukan pula pendapatan perkiraan masa depan. Pendapatan yang dimaksudkan pada teori Keynes ini adalah pendapatan absolut, bukan pendapatan relatif ataupun permanen.

b. Teori Siklus Hidup dari Konsumsi

Perilaku konsumsi individu dalam suatu periode tertentu memiliki keterkaitan dengan pendapatan individu pada periode tertentu. Teori siklus hidup memandang seseorang akan merencanakan dengan baik perilaku konsumsi untuk jangka panjang sehingga dapat mempersiapkan kegiatan konsumsi dengan perencanaan terbaik sepanjang waktu. Perencanaan tersebut diaplikasikan pada cara manabung, sehingga dalam hipotesis siklus hidup menjadikan tabungan sebagai sumber yang dapat menjamin tercapainya konsumsi di hari tua.

Albert Ando, R. Brumberg, dan F. Modigliani menguraikan mengenai pola pengeluaran konsumsi masyarakat berdasarkan pada realitas pola penerimaan dan pengeluaran konsumsi individu dipengaruhi oleh masa atau waktu dalam siklus hidupnya.⁵⁷ Teori siklus hidup berpendapat bahwa aktivitas ekonomi yang

⁵⁷ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 148.

dilakukan seseorang merupakan aktivitas ekonomi seumur hidup. Teori ini memandang bahwa pola konsumsi individu ataupun rumah tangga dapat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi.

Menurut teori siklus hidup terdapat tiga faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pola konsumsi seseorang, yaitu:⁵⁸

- Seseorang yang baru dilahirkan atau berumur nol tahun, akan memulai kegiatan konsumsinya walaupun belum menghasilkan pendapatan. Ini menyatakan bahwa seseorang yang berpendapatan nol pun harus memenuhi pengeluaran konsumsi.
- 2) Seseorang yang telah memasuki usia untuk bekerja dapat menghasilkan penghasilannya sendiri atau mandiri secara finansial, sehingga pendapatannya digunakan untuk menabung dan membayarkan pinjaman pada masa muda.

⁵⁸ Maryam Sangaji, "Fungsi Konsumsi Rumah Tangga Di Indonesia (Pendekatan Model Koreksi Kesalahan)," *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 3, no. 2 (2009): h. 152.

3) Fase seseorang memasuki usia tua dan tidak memiliki pendapatan dan akan mengambil tabungannya. Jika seseorang memasuki masa tua namun tidak memiliki tabungan hasil dari pendapatannya dimasa produktif, maka ia akan cenderung akan berperilaku *dissaving*.

Pada siklus daur hidup, konsumsi bukan hanya bertumpu pada pendapatan rumah tangga pada saat ini, namun konsumsi juga bergantung pada kekayaan dan pendapatan yang diharapkan pada masa depan. Seseorang akan mendistribusikan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan aktivitas konsumsi selama hidupnya. Kegiatan redistribusi ini tidak berpengaruh pada pengeluaran konsumsi secara agregat. Namun dengan melakukan redistribusi sumber daya yang dimiliki dapat membantu kelompok berpendapatan rendah, masyarakat miskin, sekaligus masyarakat yang membutuhkan.

c. Teori Konsumsi Pendapatan Relatif

Teori konsumsi pendapatan relatif dikemukakan oleh James S. Duesenberry yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki kecenderungan untuk meningkatkan konsumsi ketika terjadi peningkatan pendapatan. Sehingga pendapatan tertinggi yang dicapai dapat menentukan perilaku konsumsi masyarakat.

Ketika konsumen mengalami pengurangan pendapatan, maka kecenderungan yang dilakukan konsumen yaitu tidak mengurangi pengeluaran konsumsinya untuk tetap mempertahankan konsumsi yang tinggi, sehingga sikap yang diambil oleh konsumen yaitu mengurangi besaran tabungan yang disimpannya. Kemudian jika konsumen mengalami pertambahan pendapatan, maka konsumen tersebut akan menambah tingkat konsumsinya, namun diikuti

⁵⁹ Persaulian, Aimon, dan Anis, "Analisis Konsumsi Masyarakat di Indonesia," ..., h. 18.

dengan penambahan tabungan yang lebih besar dari pada pertambahan biaya konsumsi. Perilaku konsumen ini akan terus berlangsung hingga pendapatan tertinggi yang pernah diraih dapat tercapai kembali.

3. Pola Pengeluaran Perkapita

Pola pengeluaran per kapita penduduk dapat dilihat berdasarkan data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga terbagi atas dua bagian yakni pengeluaran untuk makanan dan non makanan yang keduanya saling berkaitan. Penduduk yang berpenghasilan kecil atau penduduk miskin akan mempergunakan sebagain besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan pokok hariannya seperti makanan. Kemudian jika penduduk mengalami peningkatan pendapatan maka posisi memprioritaskan kebutuhan makanan tersebut akan bergeser pada kebutuhan sekunder.

Pola pengeluaran sebagai salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk, sehingga jika terjadi pergeseran pola pengeluaran konsumsi penduduk maka menandakan terjadi perubahan pada kesejahteraan penduduk. Elastisitas permintaan dapat mengubah ataupun mengakibatkan pergeseran pada komposisi dan pola pengeluaran penduduk. Hal ini dikarenakan elastisitas permintaan dapat mengukur perubahan yang sifatnya relatif pada jumlah barang yang dibeli konsumen dikarenakan adanya perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya seperti harga barang itu sendiri, pendapatan dan harga barang lain (*cateris paribus*). 60

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan berdasarkan pada nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli dalam suatu periode, yang diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Paritas daya beli diperoleh berdasarkan dari perhitungan 96 komoditas, dengan sebanyak 66 komoditasnya adalah komoditas makanan dan 30 komoditasnya adalah non makanan yang dihitung dengan Metode Rao sebagai berikut:

⁶⁰ Ansar, *Teori Ekonomi Mikro* (Bogor: IPB Press, 2019), h. 100.

$$PPP_{j} = \prod_{i=1}^{m} \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}}\right)^{1/m}$$

Dimana:

PPP_i = Paritas daya beli di kabupaten/kota j

P_{ij} = Harga komoditas i di kabupaten/kota j

P_{ik} = Harga komoditas i di Jakarta Selatan

m = Jumlah komoditas

Pergeseran komponen dan pola pengeluaran dapat terjadi disebabkan elastisitas terhadap kebutuhan makanan relatif rendah, namun untuk elastisitas permintaan terhadap kebutuhan non makanan relatif tinggi. Ketika tingkat konsumsi makanan mengalami titik jenuh, maka pendapatan dipergunakan untuk kebutuhan non makanan dan sebagai investasi serta tabungan. Sehingga dapat dipahami bahwa suatu rumah tangga akan semakin sejahtera jika persentase pengeluaran konsumsi untuk makanan lebih kecil dari pada persentase pengeluaran non makanan.

Pola pengeluaran konsumsi rumah tangga terbagi atas tiga kategori yaitu:⁶¹

- Kategori rendah, yaitu jika alokasi untuk konsumsi makanan kurang dari 50 % dari total pengeluaran.
- Kategori sedang, yaitu jika alokasi untuk konsumsi makanan sebesar 50 % hingga 60 % dari total pengeluaran.
- Kategori tinggi, yaitu jika alokasi untuk konsumsi makanan lebih besar dari 60 % dari total pengeluaran.

Perkembangan konsumsi pada masyarakat relatif cepat, hal ini menyebabkan perilaku konsumsi masyarakat juga cepat mengalami perubahan. Pendapatan masyarakat berpengaruh positif terhadap pengeluaran per kapita, maka jika pendapatan masyarakat naik, maka pengeluaran konsumsi masyarakat pun akan bertambah.

$C = a + b Y_d$

Dimana C adalah besaran pengeluaran konsumsi rumah tangga, *a* sebagai besaran konsumsi yang tidak

⁶¹ Amri Amir, "Pola dan Perilaku Konsumsi Masyarakat Muslim di Provinsi Jambi (Telaah Berdasarkan Tingkat Pendapatan dan Keimanan)," *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 4, no. 2 (2016): h. 78.

bergantung pada jumlah pendapatan, b adalah Marginal Propensity to Consume (MPC), dan Y_d adalah pendapatan disposabel atau pendapatan yang siap dikonsumsi.

$0 \le MPC \le 1$

Pola konsumsi penduduk dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi masyarakat serta budaya masyarakat pun dapat mengkonstruksi pola konsumsi penduduk. Sehingga keadaan sosial ekonomi dijadikan faktor yang dipergunakan pemerintah dalam mengambil keputusan perencanaan program pembangunan. Adapun pola konsumsi nasional digunakan untuk analisis kebutuhan konsumsi penduduk secara spesifik dan mengetahui komoditas yang dikonsumsi penduduk.

4. Konsep Pengeluaran Per Kapita dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Pengeluaran Konsumsi Menurut Monzer Kahf

Pandangan konsumsi menurut Monzer Kahf didasari pada rasionalisasi Islam, konsep falah, serta skala waktu. Aktivitas konsumsi perlu memperhatikan tujuan duniawi dan ukhrawi. Dalam memaksimalkan kebutuhan bukanlah sesuatu yang dilarang dalam Islam selama tidak melibatkan hal-hal yang merusak.⁶²

Adapun unsur-unsur pokok rasionalisme vaitu:63

- 1) Konsep kesuksesan, Islam melegalkan individu untuk mencapai kesuksesan di dalam hidupnya aktivitas melalui ekonomi. dengan menyeimbangkan kesuksesan di dunia dan akhirat berdasarkan moral agama Islam.
- 2) Skala waktu perilaku konsumen. Islam berpandangan bahwa kehidupan dunia hanya sementara, keseimbangan pada kedua tempo waktu yaitu dunia dan akhirat. Pengorbanan terhadap keuntungan di dunia perlu dipersiapkan untuk kehidupan di hari akhirat.

⁶² Havis Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Depok: Kencana, 2017), h. 67.

⁶³ Havis Aravik, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer",..., h. 68.

- 3) Konsep kekayaan. Kekayaan adalah amanah dari Allah Swt dan sebagai instrumen bagi manusia untuk mencapai kesuksesan di hari akhirat nanti.
- 4) Konsep barang. Ekonomi Islam membagi barang menjadi tiga kategori yaitu, barang keperluan primer (daruriyyat), barang sekunder (hajiyyat), dan barang tersier (tahsiniyyat). Dalam menggunakan barang senantiasa memperhatikan tujuan-tujuan sesuai syariah
- 5) Etika konsumen. Islam tidak melarang individu mengkonsumsi barang selama individu tidak mengkonsumsi barang yang diharamkan dan berbahaya. Adapun Islam melarang mengkonsumsi barang dengan tujuan *israf* (pembaziran) serta *tabzir*.

Pemikiran Kahf mengenai konsumsi yaitu dengan memperkenalkan *final spending* (FS) sebagai variabel standar dalam mengukur kepuasan maksimum bagi konsumen muslim.⁶⁴ Mengukur dengan melihat institusi zakat sebagai bagian dari struktur sosio-ekonomi. Zakat sebagai pengeluaran yang memberikan keuntungan, sifat dari zakat yang tetap, sehingga diasumsikan di luar *final spending*. Sasaran konsumsi bagi konsumen muslim yaitu konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga, tabungan, serta sebagai tanggung jawab sosial.

b. Pengeluaran Konsumsi Menurut Muhammad Abdul Mannan

Abdul Mannan berpandangan mengenai konsumsi sebagai bagian yang penting dan bukan hanya hakikatnya sebagai penggunaan output produksi. Konsumsi dalam ekonomi Islam perlu diiringi dengan perubahan dalam distribusi pendapatan maupun kekayaan kearah pemerataan dan keadilan. 65 Pelarangan mengkonsumsi barang mewah tanpa

⁶⁵ Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, h. 52.

⁶⁴ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 311.

disertai langkah redistribusi pendapatan maupun kekayaan yang dimiliki tidak dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi.

Pola konsumsi modern menganggap bahwa meningkatnya kehidupan masyarakat akan menyebabkan semakin meluasnya kebutuhankebutuhan yang cenderung akan mengejar berbagai tingkatan konsumsi dan tingkatan kepuasan yang tidak terbatas. Pola konsumsi ini bertentangan dengan ajaran Islam yang membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Etika ekonomi Islam menganjurkan agar manusia mengurangi kebutuhan material manusia demi tercapainya tujuan spiritualnya. Ekonomi Islam memberikan ketentuan dalam konsumsi agar tetap terkendali seperti keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati dan moralitas.66

⁶⁶ Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer,..., h. 53.

c. Pengeluaran Konsumsi Menurut Adiwarman A. Karim

Adiwarman Karim berpandangan bahwa seorang muslim akan selalu bertindak rasional dalam pendapatannya mengeluarkan untuk keperluan konsumsi.⁶⁷ Konsumen dalam mengambil keputusan didasarkan pada pertimbangan berbagai prioritas, kesempatan, fungsi utilitas serta kerugian yang ada. Utilitas yang ingin dicapai konsumen muslim bukan hanya mengukur besarannya, namun mempertimbangkan *maslahat* dan *mudharat* yang akan ditimbulkan dari mengkonsumsi suatu komoditas.

Pandangan ekonomi Islam mengenai konsep economic man yang bersifat rasional dengan mementingkan kepentingan pribadi atau self interest sebagai konsep unggulan dari ekonomi konvensional yang menyatakan tujuan akhir dari teori konsumsi

⁶⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi mikro Islami Edisi Kelima* (Depok:

Rajawali Pers, 2018), ..., h. 99.

adalah memaksimalkan tingkat kepuasan atau memaksimalkan manfaat (*utility maximization*) ditolak oleh konsep konsumsi ekonomi Islam.

Dalam sudut pandang ekonomi Islam, konsep economic man berorientasi pada kepentingan diri sendiri merupakan konsep yang kurang tepat. Seharusnya dalam aktivitas konsumsi masyarakat perlu menerapkan konsep Islamic man yang berorientasi pada nafsul muthmainnah atau pada pencapaian falah. 68

Konsep mencapai falah ini mendukung manusia untuk memaksimalkan kemaslahatan (maslahah maximization) dalam kegiatan perekonomian. Sehingga dalam melakukan kegiatan konsumsi bukan hanya berorientasi pada diri sendiri melainkan juga diseimbangkan dengan berorientasi pada orang lain serta lingkungan, yang direfleksikan pada kegiatan berbagi seperti zakat, infak dan sedekah.

⁶⁸ Beik dan Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, ..., h. 155.

Pengeluaran konsumsi dilakukan pada barang yang halal dan baik dengan tidak berperilaku boros lebih mengutamakan *saving* dan berinfak.⁶⁹ Sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 31 yaitu:

Artinya:

"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebihlebihan." (QS. Al-A'raf [7]: 31)⁷⁰

Pengeluaran konsumsi juga hendaknya menjauhi tindakan yang melanggar aturan syariat, seperti melakukan judi, mengkonsumsi khamar, gharar, dan perilaku menyimpang lainnya.

Dalam ekonomi Islam, pengeluaran untuk konsumsi tidak terlepas dari peran keimanan sebagai

⁶⁹ Amir, "Pola dan Perilaku Konsumsi Masyarakat Muslim di Provinsi Jambi (Telaah Berdasarkan Tingkat Pendapatan dan Keimanan)," h. 74.

⁷⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,..., h. 154.

landasan seorang muslim untuk mengarahkan perilaku manusia dalam kegiatan konsumsi. Bagi Ahmed dalam Aldila, berpandangan bahwa keimanan dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk memilih kuantitas serta kualitas suatu komoditas yang dapat membentuk kepuasan material bahkan spiritual.⁷¹ Berikut karakteristik perilaku berdasarkan keimanan sebagai perkiraan:

- a. Perilaku ekonomi yang mencerminkan keimanan pada tingkat yang cukup baik, maka motif terdapat tiga motif konsumsi yaitu utama, maslahat, kebutuhan serta kewajiban.
- Perilaku konsumsi yang mencerminkan keimanan pada tingkat yang kurang baik, maka akan dipengaruhi oleh sikap materialisme dan individualitas.

71 Aldila Septiana, "Analisis Perilaku Konsumsi dalam Islam," *Dinar* Vol. 1, no. 2 (2015): h. 7.

c. Perilaku konsumsi yang mencerminkan keimanan pada tingkat yang buruk, maka motif ekonomi didominasi oleh individualitas, rasionalitas, oportunisme, dan lainnya.

Prinsip keseimbangan pengeluaran konsumsi jika dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam maka akan berimplikasi pada terhapusnya berbagai kerusakan ekonomi seperti pemborosan, ketamakan serta kekikiran yang menjadi cerminan sistem kapitalis modern.⁷² berperilaku Larangan boros bukan tercermin dari perilaku kikir. Keseimbangan pengeluaran konsumsi memperhatikan tetap kebutuhan pribadi dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas untuk kepentingan pribadi.

Seorang muslim didik untuk saling membantu meskipun dalam keadaan kekurangan sesuai dengan

⁷² Novi Indriyani Sitepu, "Perilaku Konsumsi Islam Di Indonesia," Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol. 2, no. 1 (2016): h. 97.

kemampuannya. Berbagi tidak hanya berkaitan dengan materi, memberikan pengetahuan yang bermanfaat serta berperilaku terpuji pun sangat berguna bagi keseimbangan kehidupan.

D. Konsep Indeks Pembangunan Manusia

1. Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Bagi *United Nations Developmen Program* (UNDP) dalam *Human Development Report* 1991, pembangunan manusia merupakan sesuatu proses tingkatan preferensi ataupun pilihan yang lebih banyak untuk manusia dalam menjalani kehidupan (*a process of increasing people options*) ataupun proses kenaikan keahlian manusia.⁷³ Peningkatan preferensi manusia terbagi atas 3 hal yaitu menempuh kehidupan yang sehat dengan jangka waktu yang relatif lama, mempunyai pengetahuan, pekerjaan dan pendapatan untuk memenuhi

⁷³ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten* 2017 (Banten: BPS Provinsi Banten, 2018), h. 31.

kebutuhan hidup yang sesuai dengan standar kelayakan hidup.

Dalam pandangan pembangunan manusia, tujuan utama dari pembangunan manusia yaitu memperluas preferensi atau pilihan manusia diantaranya yaitu memperluas pilihan manusia dalam kebebasan berbicara, kebebasan beragama, memiliki keluarga dan lingkungan adanya pesamaan yang sehat, hukum, kebebasan berekspresi, ikut serta dalam partisipasi politik, terpenuhinya akses teknologi, terjamin keamanan fisik, terjaganya kerukunan antar masyarakat dan lain sebagainya. Bentuk dari perluasan pilihan manusia yaitu pembentukan keahlian manusia yang diaplikasikan pada bidang kesehatan, pengetahuan serta kemampuan yang bertambah sehingga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan bekerja, serta dapat menikmati kehidupan dengan aktif dalam bermacam aktivitas kebudayaan, ekonomi, sosial serta politik.

Konsep pembangunan manusia menurut UNDP dipahami bukan hanya dari perkembangan ekonomi, namun juga dari sudut pandang manusia. Beberapa premis bernilai dalam pembangunan manusia yaitu:

- a. Pembangunan wajib memprioritaskan masyarakat selaku pusat perhatian.
- b. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan preferensi penduduk, tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan penduduk. Pembangunan manusia wajib fokus pada penduduk secara totalitas.
- c. Pembangunan manusia memprioritaskan pada peningkatan keahlian (kapabilitas) manusia disertai usaha untuk menggunakan keahlian tersebut secara maksimal.
- d. Pembangunan manusia didasari 4 pilar utama, yaitu produktivitas, pemerataan, berkelanjutan, serta pemberdayaan.
- e. Pembangunan manusia sebagai tolok ukur penentuan tujuan pembangunan serta dalam menganalisis preferensi untuk meraihnya.

Menurut Todaro, Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks yang menghitung pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang diukur berdsarkan perpaduan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil per kapita yang telah disesuaikan.⁷⁴ Proses pengembangan kemampuan manusia difokuskan menyeluruh pada peningkatan kapabilitas manusia melalui investasi pada diri manusia. Selain itu, dilakukan dengan memaksimalkan kemampuan manusia dengan penciptaan kerangka partisipasi sehingga dapat menghasilkan pendapatan dan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat luas.

Indeks Pembangunan Manusia menurut BPS dalam publikasi tahunannya mendefinisikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan kesimpulan ratarata atas keberhasilan dimensi pokok alat ukur pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup

⁷⁴ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi 10, Erlangga* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 57.

sehat, memiliki pengetahuan dan berkehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak. ⁷⁵ Melalui dimensi pokok tersebut, IPM dipergunakan diberbagai negara termasuk Indonesia, dengan menyesuaikan ketersediaan data masing-masing negara.

Menurut Syaipuddin dkk, perbedaan nilai IPM pada suatu negara maupun antar daerah dipengaruhi oleh produktivitas penduduk yang berbeda di setiap daerah akan menimbulkan masalah ketimpangan pendapatan antar wilayah. ⁷⁶ Keberhasilan pembangunan daerah atau ekonomi dinilai dengan memastikan taraf hidup masyarakat berjalan secara merata. Produktivitas penduduk dapat dipengaruhi oleh nilai tinggi rendahnya IPM. Nilai **IPM** yang tinggi berpengaruh pada peningkatan produktivitas penduduk akan memicu peningkatan pendapatan penduduk. Nilai IPM rendah akan menjadikan

⁷⁵ Statistik, *Provinsi Banten Dalam Angka 2021*, h. 119.

⁷⁶ Syaripuddin, Baharuddin Semmaila, dan Aminuddin, "Pengaruh Aglomerasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sulawesi," *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol. 4, no. 1 (2021): h. 42.

produktivitas penduduk menurun berdampak pada rendahnya pendapatan yang diperoleh penduduk.

Adapun Arsyad berpandangan bahwa kebijakan masing-masing internal pemerintahan suatu mengenai pembangunan manusia menjadi penyebab adanya perbedaan nilai IPM pada suatu negara.77 Suatu sikap pemerintah mendukung pembangunan manusia dapat tercermin dari kebijakan-kebijakan yang dibuatnya memfokuskan diri pada pembangunan manusia melalui besaran alokasi dana anggaran pemerintah diperuntukan pada pemulihan bidang pendidikan dan kesehatan.

Menurut Damanhuri, penciptaan kebijakan ekonomi oleh pemerintah diharuskan berbasis pada sumber daya yang dimiliki oleh negara Indonesia, dengan ini maka ketergantungan pada bantuan asing atau pihak luar akan menurun.⁷⁸ Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada

 77 Arsyad, $Pembangunan\ Ekonomi\ Edisi\ Kelima, ..., h. 48.$

⁷⁸ Didin S Damanhuri, *Masalah dan Kebijakan: Pembangunan Ekonomi Indonesia* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2018), h. 117.

sumber daya manusia dapat memutus penguasaan pihak asing atas kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara ini. Proses pembangunan senantiasa memacu pembangunan keahlian dan kemandirian sumber daya manusia untuk menciptakan negara yang mandiri pula.

Menurut Sitompul, kebebasan perluasan pilihan masyarakat berkaitan dengan kebebasan politik, sosial dan ekonomi yang berdampak pada kreativitas dan produktivitas sebagai jaminan dari hak asasi manusia. 79 Proses peningkatan kemampuan manusia difokuskan menyeluruh pada peningkatan bidang kemampuan manusia melalui investasi pada diri manusia. Pemanfaatan kemampuan manusia dengan adanya penciptaan kerangka partisipasi yang bertujuan memperoleh pendapatan dan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Adapun

-

⁷⁹ Boy Sitompul, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pendapatan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan Periode 2010 - 2019," *Journal of Trends Economics and Accounting Research* Vol. 1, no. 2 (2020): h. 69.

manfaat dari Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:⁸⁰

- a. IPM sebagai indikator penting berfungsi mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia.
- b. IPM menentukan peringkat pencapaian pembangunan suatu wilayah maupun negara.
- c. Untuk Indonesia, IPM adalah data strategis yang berguna mengukur kinerja pemerintah dan alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

2. Teori-Teori Pembangunan Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Kemampuan mendayagunakan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki manusia menjadikan negara dapat berkembang maju secara berkelanjutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan pun akan menghasilkan negara yang makmur dan sejahtera. Karena keberhasilan dari pembangunan suatu negara merupakan refleksi dari keberhasilan

⁸⁰ Statistik, Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru, h. 10.

manusia. Teori-teori mengenai pembangunan manusia, vaitu:

a. Human Capital Theory

Human capital tersusun atas dua kata yaitu human (manusia) dan capital (modal). Modal bagian dari faktor produksi yang merupakan digunakan untuk memproduksi barang ataupun jasa. Menurut Schultz dalam Farah & Puspita, mendefinisikan modal manusia merupakan bagian kualitatif dari sumber daya manusia, yang akan berhubungan pada kemampuan produktivitas manusia. Kemampuan, keterampilan serta pengetahuan sebagai potensi diri manusia dapat dikembangkan melalui proses pendidikan formal maupun non formal serta menjaga kondisi kesehatan baik fisik maupun mental.81

Manusia sebagai sebuah bentuk modal, seperti modal produksi lainnya yaitu modal fisik dan

-

⁸¹ Alfa Farah dan Erlinda Puspita Sari, "Modal Manusia Dan Produktivitas," *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* Vol. 7, no. 1 (2014): h. 23.

teknologi. *Human capital* didefinisikan sebagai potensi berupa keterampilan ataupun kemampuan yang terdapat pada diri manusia sehingga mampu menjadikan dirinya menghasilkan produktivitas yang baik sebagai makhluk sosial yang dapat mengelola potensi yang ada pada diri sendiri demi tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan.⁸²

Pendapat Todaro dalam Nurkholis mengenai pengukuran *human capital* dapat dihitung atau diukur melalui aspek pendidikan dan kesehatan. Proses pendidikan dan pelatihan dapat menambah nilai potensial diri. Konsep ini menjelaskan semakin tinggi tingkat pendidikan atau pelatihan yang ditempuh seseorang maka keahlian dan keterampilan juga akan semakin meningkat. Kesehatan dan pendidikan harus berjalan beriringan, karena tingkat pendidikan tinggi

-

⁸² Damanhuri, *Masalah dan Kebijakan: Pembangunan Ekonomi Indonesia*, ..., h. 101.

⁸³ Afid Nurkholis, "Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory," *INA-Rxiv*, 2018, h. 4.

seseorang perlu diimbangi dengan kondisi tubuh yang sehat sehingga tetap dapat menghasilkan produktivitas yang maksimal dan berkualitas.

b. Human Investment Theory

Investasi sumber daya manusia menurut Hanapiah dalam Nurkholis yaitu bentuk loyalitas terhadap sesuatu yang dihitung berdasarkan nilai uang dengan maksud memperoleh pendapatan yang menjanjikan di masa depan. 84 Investasi sumber daya manusia berkaitan dengan modal manusia, investasi sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas modal manusia.

Pambudi berpandangan bahwa investasi sumber daya manusia adalah keterkaitan pengaruh antara pendidikan formal terhadap peningkatan perekonomian, dengan harapan seiring meningkatnya

6.

Nurkholis, "Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory",...,h.

pendidikan yang ditempuh dapat memaksimalkan produktivitas yang dicapai.⁸⁵

Investasi manusia memiliki tujuan untuk meningkatkan kecerdasan manusia, baik itu kecerdasan interpersonal yaitu kemampuan untuk memahami dan bertindak ketika berinteraksi dengan seseorang. Maupun kecerdasan intrapersonal seperti pengetahuan dan kemampuan bertindak fleksibel atas dasar kelimuan yang ada padanya, investasi manusia juga dapat meningkatkan kecerdasan-kecerdasan lainnya yang teradang belum disadari seseorang.

c. Human Development Theory

Pembangunan manusia atau *human development* merupakan perluasan pilihan-pilihan atau preferensi manusia untuk hidup sebagai proses peningkatan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan manusia. Peningkatan pilihan manusia terdiri atas memperoleh

⁸⁵ Eko Wicaksono Pambudi dan Miyasto, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor - Faktor yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)" Vol. 2, no. 2 (2013): h. 2.

kehidupan yang sehat dengan umur panjang, mendapatkan pengetahuan, meraih kesempatan kerja dan memiliki pendapatan yang mencukupi kebutuhan hidup.

Tujuan pencapaian pembangunan manusia yaitu meningkatnya produktivitas penduduk atas hasil dari modal manusia dan investasi manusia, pemerataan atas fasilitas dan layanan yang diberikan pemerintah sehingga mendapatkan akses sumber daya sosial dan ekonomi, pembangunan dilakukan secara terus menerus, serta tujuan lainnya yaitu adanya partisipasi penduduk dalam memberdayakan kemampuannya untuk menentukan keputusan dalam hidupnya. Adapun pengukuran peningkatan pembangunan manusia diukur berdasarkan dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak dengan mengacu pada kesesuaian tolok ukur yang telah ditetapkan United National Development Program.

d. Sustainable Development Theory

Pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut sustainable development (SDGs) ialah konvensi pembangunan baru yang menekan terbentuknya transformasi ke arah pembangunan berkelanjutan, yang bersumber pada hak asasi manusia serta kesetaraan untuk pembangunan sosial, ekonomi serta area hidup. 86 SDGs disahkan dalam persidangan umum PBB pada september 2015, yang hendak membingkai tiap penjadwalan dan kebijakan politik negara-negara anggota PBB sepanjang 15 tahun ke depan. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universalitas, integritas serta inklusif, sehingga dapat meyakinkan bahwa tidak terdapat seorang pun yang terlewatkan (No one is left behind) ataupun dengan semboyan baru yaitu jangan tinggalkan siapapun di belakang (leave no one behind).

⁸⁶ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten* 2019 (Banten: BPS Provinsi Banten, 2020), h. 8.

Tujuan dari pembangunan berkelanjutan antara lain tiada kemiskinan dan kelaparan, kehidupan sehat serta sejahtera, pendidikan/ pembelajaran bermutu, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi pekerjaan bersih serta terjangkau, layak pertumbuhan ekonomi, industri yang berinovasi dan insfrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengendalian pergantian iklim, ekosistem lautan dan daratan yang terpelihara, perdamaian, keadilan serta kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk menggapai tujuan.

3. Metodologi Indeks Pembangunan Manusia

Sejak tahun 2010 sampai tahun 2013 UNDP melakukan perubahan metodologi untuk mengukur IPM, kemudian pada tahun 2014 Indonesia turut mengadopsi IPM Metode Baru.

Tabel 2.3

Perbedaan Indikator IPM – Badan Pusat Statistik

Metode Lama dan Metode Baru

| Dimensi | Indikator | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Dimensi | Metode Lama | Metode Baru | |
| Umur Panjang dan Hidup Sehat | Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) | Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) | |
| Pengetahuan | Angka Melek Huruf (AMH) | Harapan Lama Sekolah (HLS) | |
| | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas | |
| Standar Hidup Layak | Pengeluaran Per Kapita: 27 Komoditas Paritas Daya Beli | Pengeluaran Per Kapita: 96 Komoditas Paritas Daya Beli | |
| Agregasi | Rata-rata Aritmatik | Rata-rata Geometrik | |
| Perubahan Capaian | Reduksi Shortfall (RSF) | Pertumbuhan | |

Sumber: BPS Provinsi Banten 2019

Terdapat dua dampak akibat dari adanya perubahan metode penghitungan IPM yaitu: 87

a. Adanya perubahan pada level IPM. Pada level IPM
metode baru akan cenderung lebih rendah jika
dibandingkan dengan penghitungan IPM metode lama,

 87 Badan Pusat Statistik,
 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten 2018 (Banten: BPS Provinsi Banten, 2019), h. 22.

- dikarenakan adanya perubahan indikator cara penghitungannya.
- b. Berdampak pada perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator penghitungan berakibat pada perubahan indeks dimensi, dan perubahan cara penghitungan berakibat pada agregasi indeks. Peringkat IPM kedua metode penghitungan tersebut tidak dapat dibandingkan, dan tetap dapat dijadikan rujuukan dalam melihat pencapaian pembangunan manusia.

Terdapat 2 tahapan dalam penghitungan untuk memperoleh nilai IPM yaitu:

- a. Melakukan penghitungan pada setiap komponen pembentuk IPM yakni pada Indeks Umur Harapan Hidup, Indeks Pengetahuan serta Indeks Pendapatan dengan cara membandingkan nilai pada masing-masing komponen dengan standar maksimum dan minimum yang ditetapkan.
- b. Menghitung nilai IPM yang merupakan rata-rata geometrik atas ketiga dimensi pembentuk IPM.

Tabel 2.4
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM
Metode Baru

| Komponen IPM | Maksimum | Minimum | Keterangan |
|--------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Umur Harapan Hidup | 85 | 20 | Standar UNDP |
| Harapan Lama Sekolah | 18 | 0 | Standar UNDP |
| Rata-rata Lama Sekolah | 15 | 0 | Standar UNDP |
| Pengeluaran per kapita setahun disesuaikan | 26.572.252 | 1.007.436 | Standar BPS |

Sumber: BPS Provinsi Banten 2018

Rumus penghitungan IPM sebagai berikut:

$\sqrt[3]{Indeks\ UHH\ imes Indeks\ Pengetahuan\ imes Indeks\ Pendapatan}$

Pencapaian pembangunan manusia dapat dianalisis berdasarkan 2 pencapaian, yakni kenaikan IPM secara nilai absolut yang diperoleh dari pengukuran pertumbuhan nilai IPM. Pertumbuhan nilai IPM yaitu peningkatan IPM pada periode (t+n) terhadap nilai IPM pada awal periode (t). Rumus pertumbuhan IPM sebagai berikut:

$$r = \frac{IPM_{t+1} - IPM_t}{IPM_t} \times 100$$

Pencapaian kedua dilihat berdasarkan kenaikan status pembangunan manusia sesuai dengan klasifikasi

status yang ditetapkan UNDP. Klasifikasi status IPM sebagai berikut:

Tabel 2.5 Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

| Nilai IPM | Status | |
|-------------------|---------------|--|
| < 60 | Rendah | |
| $60 \le IPM < 70$ | Sedang | |
| $70 \le IPM < 80$ | Tinggi | |
| ≥ 80 | Sangat Tinggi | |

Sumber: BPS Provinsi Banten 2019

Pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Banten pada tahun 2020 sebesar 72,45 %, nilai IPM ini berada pada interval IPM $70 \le IPM < 80$, maka pencapaian pembangunan manusia dalam klasifikasi status tinggi.

4. Komponen-Komponen Pembangun Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia dibangun melalui tiga dimensi, masing-masing dimensi tersebut terdiri atas indikator sebagai alat ukurnya. Komponen-komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

a. Dimensi Umur Panjang dan Sehat

United Nations Development Programme menetapkan indikator umur harapan hidup waktu lahir sebagai ketetapan penghitungan dimensi umur panjang dan sehat. 88 Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang ditempuh oleh seseorang selama hidup. Semakin baik kesehatan seseorang maka kesempatan untuk bertahan hidup dan berumur panjang akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika semakin buruk kesehatan seseorang maka kesempatan bertahan hidup akan semakin rendah. Dengan itu, UHH dapat mendefinisikan dimensi umur panjang dan sehat.

UHH diperoleh dari penghitungan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*), data diperoleh berdasarkan jumlah "Anak Kandung Lahir Hidup" dan "Anak Kandung Masih Hidup". Berdasarkan rekam jejak data kependudukan dan situasi umum di

⁸⁸ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten* 2016 (Banten: BPS Provinsi Banten, 2017), h. 33.

Indonesia maka penghitungan UHH menggunakan paket program *Mortpack* dengan metode *Trussel* dan model *west*.

Program paket *Mortpack* menghasilkan estimasi UHH empat tahun sebelum tahun sensus. Langkah yang dilakukan untuk mendapat UHH pada tahun sensus maka dilakukan *fitting model* dari beberapa rekam data historis kependudukan. UHH dihitung menggunakan data Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2010.

Setelah UHH diperoleh, maka dilanjutkan dengan penghitungan Indeks UHH, dengan cara membandingkan angka UHH dengan angka yang telah terstandarisasi oleh UNDP, yakni umur harapan hidup minimum selama 20 tahun dan umur harapan hidup maksimum selama 85 tahun.

b. Dimensi Pengetahuan

Pendidikan berkontribusi dengan signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara diakui

kebenarannya. Pendidikan bukan hanya sebagai pembiayaan karena pendidikan sebagai investasi pembangunan manusia dalam jangka panjang yang berdampak pada pembangunan ekonomi suatu negara. Pendidikan bukan hanya melahirkan generasi yang berkualitas, berpengetahuan luas, mandiri dan berkarakter, namun pendidikan mampu menciptakan kondisi berbisnis yang adil, produktif dan kondusif.

Dimensi pengetahuan dalam penghitungannya mempergunakan dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indikator ini mendeskripsikan kualitas sumber daya manusia dari segi pendidikan. ⁸⁹ Karena semakin lama rata-rata tahun pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia.

1) Harapan Lama Sekolah

⁸⁹ Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten 2019*, ..., h.

Harapan lama sekolah (HLS) merupakan lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas sesuai kebijakan pemerintah program wajib belajar. Data HLS diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Setelah HLS diperoleh, selanjutnta menghitung Indeks HLS, dengan membandingkan angka HLS dengan angka yang sudah menjadi standar UNDP yaitu menetapkan HLS minimum selama 0 tahun dan HLS maksimum selama 18 tahun.

2) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah dilalui oleh penduduk usia 25 tahun ke atas diseluruh jenjang pendidikan forman yang pernah ditempuh. Perhitungan RLS pada penduduk usia 25 tahun ke atas, dengan

asumsi pada usia 25 tahun proses pendidikan telah berakhir dan sumber data diperoleh dari Susenas.

Penghitungan RLS dengan mengolah variabel jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan variabel kelas pendidikan yang sedang dijalani atau pernah diduduki secara simultan. Perolehan indeks RLS berasal dari perbandingan angka RLS terhadap angka yang menjadi standar UNDP, yaitu RLS minimum selama 0 taun dan RLS maksimum selama 15 tahun.

c. Dimensi Standar Hidup Layak

Menurut Hasan & Aziz pengeluaran rumah tangga turut berperan dalam peningkatan pembangunan manusia. Karena pada saat terjadi ketimpangan distribusi pendapatan berakibat pada kondisi keuangan rumah tangga yang memburuk, sehingga akan berdampak pada pengurangan pengeluaran baik untuk

pendidikan, kesehatan, maupun konsumsi makanan disetiap harinya. 90

Dimensi standar hidup layak dapat menginterpretasikan pencapaian kesejahteraan yang dialami oleh seluruh penduduk, yang mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi. indikator untuk mengukur dimensi standar hidup layak yang digunakan BPS yaitu rata-rata pengeluaran per kapita setahun yang telah disesuaikan.

Pengeluaran perkapita merupakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh rumah tangga selama sebulan untuk keperluan konsumsi, baik konsumsi makanan maupun konsumsi bukan makanan. Pengeluaran konsumsi ini tidak memperhatikan asal barang baik berasal dari pembelian maupun produk sendiri serta

⁹⁰ Muhammad Hasan dan Muhammad Aziz, Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal, Ed. Kedua (Makassar: CV Nur Lina Bekerja sama dengan Pustaka Taman Ilmu, 2019), h. 431.

 91 Statistik, Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Provinsi Banten 2019, ..., h. 8.

•

pengeluaran ini hanya berlaku bagi pengeluaran konsumsi rumah tangga bukan untuk keperluan usaha.

Besaran pengeluaran perkapita ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli. Data rata-rata pengeluaran perkapita setahun dari Susenas merujuk tahun dasar 2012 dibuat konstan, agar nilai pengeluaran perkapita memiliki keterbantingan antar waktu.

Perhitungan paritas daya beli, diperoleh dari nilai pengeluaran perkapita yang dapat diperbandingkan antar wilayah. Adapun untuk batasan maksimum Indeks pengeluaran per kapita setahun sebesar Rp 26,6 juta dan batasan minimum Indeks pengeluaran per kapita setahun Rp 1 juta.

5. Konsep Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Pembangunan Manusia Menurut Umer Chapra

Manusia sebagai wakil Allah Swt di muka bumi dengan segala kelengkapan yang dianugerahkan Allah Swt dari sisi spiritual, psikologi, serta sumber daya materi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan demi menjalakan misi kehidupan. Umer Chapra menerangkan bahwa misi umat manusia yaitu memiliki keleluasaan dalam berfikir, memilih serta mengubah kondisi kehidupannya ke arah yang lebih baik. 92

Menurut Chapra terdapat empat faktor yang berkaitan dengan manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam ekonomi Islam yaitu:

- 1) *Universal Brotherhood* (persaudaraan universal)
- 2) Resource are a trust (sumber daya sebagai amanat)
- 3) *Humble life style* (gaya hidup sederhana)
- 4) Human freedom (kebebasan manusia)

Faktor-faktor tersebut sebagai penyokong khalifah sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan kehidupan dunia dan akhirat. Persaudaraan secara

⁹² Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, h. 84.

universal berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, bangsa ataupun negara. Persaudaraan universal ini diharapkan dapat membawa kesamaan derajat sosial dan kehormatan bagi manusia.

Dalam upaya pembangunan manusia, Umer Chapra melihat sisi keadilan ekonomi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, sumber penghasilan yang terhormat atau layak, distribusi pendapatan dan harga yang berkeadilan, serta perkembangan yang didukung stabilitas.⁹³ Keadilan bertujuan melindungi harkat dan martabat seseorang atau tanpa menzalimi siapapun. Nilai keadilan maupun khalifah berdasarkan nilai ketauhidan. Pengaruh dari pada faktor persaudaraan dan penggunaan sumber daya secara amanah dengan memberdayakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap manusia dan memposisikan manusia sesuai pada standar kehidupan manusiawi.

⁹³ Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer,..., h. 85.

b. Pembangunan Manusia Menurut MuhammadNejatullah Siddiqi

Siddiqi berpandangan bahwa segala hak yang diberikan kepada manusia memiliki arti bahwa hak dasar manusia yaitu meraih kebebasan dalam beribadah kepada Allah Swt. 94 Pembangunan manusia menitikberatkan pada kebebasan yang dimiliki manusia dalam memenuhi kebutuhan materialnya melalui proses yang benar, sehingga manusia perlu diberikan kebebasan untuk memiliki, mendayagunakan serta mengatur sumber daya yang dimiliki.

Manusia diharapkan dapat menjamin kebutuhan dasarnya sendiri. Namun bagi pihak yang mengalami kesulitan perlu dijamin kebutuhan dasarnya agar tidak terjadi ketimpangan di masyarakat. jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi pihak yang mengalami kekurangan berupa jaminan program

94 Arovik Sojarah Domikiyan Ekonomi Islam Ko

⁹⁴ Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer,..., h. 107.

kesejahteraan melalui distribusi harta yang menghasilkan pendapatan yang adil, layak dan berkesinambungan.

c. Pembangunan Manusia Menurut Chandra Natadipurba

Pembangunan dalam Islam sebagai ikhtiar yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan demi meningkatkan kualitas kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Allah Swt. 95 Dalam ekonomi Islam, faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan suatu negara atau wilayah yaitu peran manusia, karena sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan nasional.

Pembangunan ekonomi sebagai suatu bentuk kematangan pertumbuhan kualitas manusia, dengan pencapaian materi yang ditunjang dengan pencapaian kekuatan spiritual. Manusia yang bertauhid, berprilaku

⁹⁵ Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101* (Bandung: PT. Mobidelta Indonesia, 2016), h. 193.

sesuai dengan akhlak Islam, bebas dan merdeka dapat diraih dengan pendidikan yang menyeluruh.

Permasalahan yang terjadi pada bidang pendidikan yaitu terkait dengan tidak terkoneksinya antara kebutuhan keseharian dengan apa yang diajarkan di lembaga pendidikan formal seperti sekolah, serta pendidikan belum maksimal dalam melahirkan manusia yang bersedia bekerja keras, memiliki semangat bersaing dan berjuang, disiplin, serta melahirkan karakter berbudi pekerti luhur. Permasalahan ini menjadikan tidak meratanya kualitas pendidikan yang diterima masyarakat, kemudian tidak mendukung terciptanya SDM kompeten.

Sebagai khalifah Allah Swt di muka bumi, manusia ditempatkan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah di muka bumi. Maka dengan demikian manusia berkewajiban untuk memakmurkan bumi Allah dengan penuh tanggung jawab.

هُو ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ فِي ٱلْأَرْضَ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَا وَلَا كُفُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ٢٠٠ يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ٢٠٠

Artinya:

"Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barangsiapa kafir, maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka." (QS. Faathir [35]: 39)⁹⁶

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam merupakan keseimbangan antara unsur material dan spiritual, yaitu unsur dunia dan akhirat. Unsur-unsur ini akan membawa keberhasilan iika bagi manusia dilaksanakan utuh. Adapun dalam secara pembangunan ekonomi menurut ekonomi Islam, terdapat dasar-dasar filosofis yang terkandung di dalamnya, yaitu:97

96 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,..., 439.

⁹⁷ Almizan, "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam," Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Vol. 1, no. 2 (2016): h. 219.

- a. *Tauhid Rububiyah*, filosofis ini mengajarkan bahwa Allah adalah sang pencipta dan berkuasa atas segala sesuatu. Manusia hanya bertugas untuk mengatur bagaimana model pembangunan yang dilaksanakan yang harus sesuai dengan ajaran Islam.
- Keadilan, yakni pembangunan ekonomi yang adil dan merata berdasarkan pada konsep persaudaraan antar umat manusia.
- c. *Khalifah*, Manusia berperan pada tempat yang terhormat sebagai wakil Allah Swt di muka bumi yang bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi atas pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya alam.
- d. Tazkiyah, yakni mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, alam, masyarakat dan negara.

Pembangunan dalam Islam terbentuk berdasarkan unsur-unsur berikut:⁹⁸

- a. Upaya sadar, yaitu proses pembangunan yang dilakukan secara terencana serta adanya pengaturan yang sistematis.
- Bersifat menyeluruh, yaitu program pembangunan dilaksanakan dengan terkonsep secara menyeluruh sehingga mampu merangkul secara utuh lapisan masyarakat.
- c. Bersifat berkelanjutan, yaitu proses pembangunan berkesinambungan yang terjadi disepanjang waktu sehingga dalam prosesnya memerlukan kesabaran dalam mencapai keberhasilan.
- d. Peningkatan, yaitu program pembangunan yang menciptakan progres positif ataupun berkembang disetiap waktu yang diiringi dengan evaluasi untuk mendorong keberhasilan pembangunan.

⁹⁸ Natadipurba, Ekonomi Islam 101, h. 193.

- e. Kualitas kehidupan manusia, yaitu pembangunan berupaya mencapai kualitas manusia yang berpengetahuan dan berketerampilan mumpuni, serta makmur dalam perperadaban yang maju.
- f. Seutuhnya, yaitu pembangunan manusia yang komperhensif yaitu mencapai pembangunan jasmani, rohani, pikiran dan perasaan yang juga berorientasi pada dunia serta akhirat.
- g. Kehendak Allah Swt, yaitu pembangunan sesuai dengan syarat atau ajaran yang Allah kehendaki dengan memprioritaskan maslahah serta manfaat dari pembangunan itu sendiri.

Sehingga modal manusia merupakan potensi besar untuk memakmurkan perekonomian nasional, karena seluruh ciptaan Allah Swt di bumi ini diperuntukan bagi kemaslahatan umat manusia. Maka dasar-dasar filosofis serta unsur-unsur pembangunan ekonomi Islam ini perlu dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan pengaruh dari Indeks Pembangunan Gender, tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia menurut ekonomi syariah di Provinsi Banten periode tahun 2013 – 2020. Dari beberapa penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan satu pun penelitian yang sama persis seperti penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian terdahulu yang dipaparkan dalam penelitian ini tidak terbatas pada faktor Indeks Pembangunan Gender, tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita saja yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, namun bersifat umum dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan tinjauan pustaka dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian A Jauhar Mahya dan Widowati yang berjudul pengaruh angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia.⁹⁹ Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita berpengaruh signifikan terhadap IPM yakni sebesar 97,8 %.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah perbedaan wilayah penelitian studi kasus di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penulis melakukan studi kasus di Provinsi Banten. Persamaan pada penelitian ini yaitu pada satu variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan yakni pengeluaran per kapita terhadap IPM.

Penelitian Jahtu Widya Ningrum, Aziza Hanifa Khairunnisa dan Nurul Huda dengan judul pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014 – 2018 dalam

99 A. Jauhar Mahya dan Widowati, "Pengaruh Angka Harapan Lama

Sekolah , Rata-Rata Lama Sekolah , dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia," *Prismatika: Jurnal Pendidikan dan Riset Matematika* Vol. 3, no. 1 (2020): h. 126.

perspektif Islam.¹⁰⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian yaitu variabel kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM.

Perbedaan pada penelitian ini yaitu studi kasus pada 34 provinsi yang ada di Indonesia dan perbedaan pada variabel bebas tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah yang tidak terdapat pada penelitian penulis. Sedangkan persamaan penelitiannya yaitu pada variabel bebas kemiskinan terhadap variabel terikat IPM.

Penelitian Emilia Khristina Kiha, Sirilius Seran, Hendriana Trifonia Lau yang berjudul pengaruh jumlah penduduk, pengangguran dan kemiskinan terhadap Indeks

¹⁰⁰ Jahtu Widya Ningrum, Aziza Hanifa Khairunnisa, dan Nurul Huda, "Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014 - 2018 dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi*

Islam Vol. 6, no. 02 (2020): h. 212.

Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belu. ¹⁰¹ Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian Emilia Khristina Kiha dkk yaitu variabel jumlah penduduk (X₁) dan pengangguran (X₂) terhadap kemiskinan (X₃) sebesar 0,790 berarti memiliki hubungan yang kuat. Hasil analisis variabel jumlah penduduk (X₁), pengangguran (X₂) dan kemiskinan (X₃) terhadap IPM (Y) sebesar 0,766 yang berarti memiliki hubungan yang kuat. Ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap IPM sebesar 55,9 %.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu studi kasus yang dilakukan yakni pada Kabupaten Belu dan variabel jumlah penduduk dan pengangguran yang tidak terdapat pada penelitian penulis. Sedangkan persamaan dengan penelitian penulis yaitu satu variabel bebas yakni kemiskinan terhadap variabel terikat Indeks Pembangunan Manusia.

Emilia Khristina Kiha, Sirilius Seran, dan Hendriana Trifonia Lau, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belu" Vol. 2, no. 07 (2021): h. 60.

Penelitian Zulfa Miftha'ul Hidayah dan Farida Rahmawati yang berjudul menelusur relasi indikator Indeks Pembangunan Gender terhadap pertumbuhan ekonomi. 102 Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif deskriptif dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yaitu penurunan ketimpangan gender dalam aspek kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur. Kemudian kesetaraan gender aspek ketenagakerjaan tidak cukup mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu letak studi kasus di Jawa Timur serta Variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada variabel bebas Indeks Pembangunan Gender.

¹⁰² Farida Rahmawati dan Zulfa Miftha'ul Hidayah, "Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *EcceS* (*Economics, Social, and Development Studies*) Vol. 7, no. 1 (2020): h. 110.

Penelitian Uswatun Hasanah dan Ikhsan dengan judul pembangunan manusia, ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 103 Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan hasil penelitian variabel bebas angka harapan hidup berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Perbedaan pada penelitian ini yaitu studi kasus pada seluruh provinsi di Indonesia, serta angka harapan hidup dan tingkat partisipasi angkatan kerja yang menjadi indikator dari pembangunan manusia dan gender. Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai variabel bebas dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel terikat.

¹⁰³ Uswatun Hasanah dan Ikhsan, "Pembangunan Manusia, Ketimpangan dan pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* Vol. 5, no. 1 (2020): h. 46.

F. Hubungan antar Variabel

1. Hubungan antara Variabel Indeks Pembangunan Gender dengan Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan teori *nature* yang menjelaskan bahwa gender merupakan kodrat alam yang tidak layak dipertentangkan. Teori ini berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda dari sudut pandang biologis sebagai ketetapan Tuhan yang berpengaruh pada perbedaan peran maupun tanggung jawab. ¹⁰⁴

Kaum laki-laki berperan sebagai kepala rumah tangga dan bekerja di lingkungan publik untuk mencari nafkah dikarenakan struktur biologisnya lebih kuat dibandingkan perempuan. Perempuan berperan sebagai ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui. Sehingga perempuan berperan dalam ranah domestik yaitu bertanggung jawab penuh untuk menjaga dan mendidik anak serta mengurus rumah tangga. Teori nature menyatakan perbedaan peran ini sebagai pemberian Tuhan,

 $^{^{104}}$ Utaminingsih, $Gender\ dan\ Wanita\ Karir,\ ...,$ h. 18.

dan pada dasarnya perbedaan peran ini bukanlah suatu masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. ¹⁰⁵

Kaum perempuan dalam pandangan para ilmuan pembangunan sebagai kaum yang berperan penting dalam proses pembangunan. Namun realitas yang terjadi ialah kaum perempuan menjadi kaum yang miskin secara global dibandingkan dengan kaum laki-laki, karena sulitnya akses kesehatan, pendidikan dan berbagai kebebasan hak. Dalam pandangan Todaro, perempuan memiliki tanggung jawab utama yaitu menjaga, merawat serta mendidik anak dan menjaga sumber daya yang dimiliki, perempuan membawa tanggung jawab yang dapat menentukan terputus atau tidaknya siklus pewarisan kemiskinan yang disandang dari generasi ke generasi berikutnya. ¹⁰⁶

Kaum perempuan sebagai aset penting untuk menciptakan generasi yang unggul, karena kaum ibu berupaya untuk meneruskan nilai-nilai maupun normanorma penting dalam kehidupan bagi anak-anak mereka.

¹⁰⁵ Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, ..., h. 72.

¹⁰⁶ Todaro dan Smith, *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi 10*, ..., h. 27.

Sehingga seorang ibu berupaya mendidik dan memberi pendidikan yang baik bagi anaknya akan berdampak bagi keberhasilan pembangunan manusia dan negara secara keseluruhan.

Bagi Risky Puspita Sari dkk dalam penelitianya yang berjudul "Analisa Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2011 – 2017 (Studi Kasus 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah)", melihat bahwa pembangunan gender merupakan suatu indikator yang berfungsi untuk mengetahui keberhasilan pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. 107 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan Indeks Pembangunan Manusia saling berhubungan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Hal ini dikarenakan Indeks Pembangunan Gender merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

¹⁰⁷ Sari, Sarfiah, dan Indrawati, "Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2011 - 2017 (Studi asus 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah)," ..., h. 468.

perempuan yang dilihat berdasarkan dimensi pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. sehingga IPG dengan IPM saling berhubungan namun bukan sebagai faktor yang saling mempengaruhi.

Keterkaitan Indeks Pembangunan Gender dengan Indeks Pembangunan Manusia juga dapat diketahui berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah dan Ikhsan dengan judul "Pembangunan Manusia, Ketimpangan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi". Penelitian ini menerangkan bahwa IPG dan IPM saling terkait satu sama lain karena terdiri atas faktor-faktor pembangun yang sama yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, umur harapan hidup, serta pengeluaran per kapita. 108 Faktor-faktor pembangun angka IPM dan IPG ini menunjukkan pencapaian pembangunan manusia secara keseluruhan dan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender. Pembangunan manusia

¹⁰⁸ Hasanah dan Ikhsan, "Pembangunan Manusia, Ketimpangan dan pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," ..., h. 47.

merupakan rancangan pembangunan ekonomi, sehingga IPG dan IPM sebagai indikator pencapaian pembangunan ekonomi yang biasa diukur dengan pertumbuhan ekonomi.

Merujuk pada teori *equlibrium* gender, yang berpendapat bahwa ditengah perbedaan yang dimiliki, kaum laki-laki dan perempuan harus tetap bersinergi dan bekerja sama dalam keharmonisan relasi gender baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan lingkungan negara tanpa mempertentangkan relasi antar keduanya. ¹⁰⁹ Pembangunan gender maupun pembangunan manusia secara umum dapat tercipta dengan upaya saling memahami kepentingan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang dan saling melengkapi baik dari kelebihan maupun kekurangan untuk mendukung penerapan potensipotensi yang dimiliki.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Miftha'ul Hidayah dan Farida Rahmawati dengan judul "Menelusur Relasi Indikator Indeks Pembangunan Gender terhadap

109 Utaminingsih, Gender dan Wanita Karir, ..., h. 20.

Pertumbuhan Ekonomi", menjelaskan bahwa IPG dengan IPM saling berhubungan atau terkait untuk mengetahui kondisi kesetaraan atau ketimpangan pembangunan gender yang terjadi di suatu wilayah ataupun negara, dengan memperbandingkan angka IPG dengan angka IPM. 110 Kondisi ketimpangan gender dapat dikatakan menurun, jika kenaikan angka IPG diiringi dengan peningkatan angka IPM. Namun jika angka IPM lebih tinggi dibandingkan angka IPG maka ini mendeskripsikan terjadinya ketimpangan gender. Adapun kondisi kesetaraan gender dapat diketahui jika angka IPM sama dengan angka IPG, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi ketimpangan pembangunan gender.

Menurut Amartya Sen, perempuan perlu diperlakukan dengan baik terutama pada perbaikan peningkatan kesejahteraan dan kebebasan perempuan.¹¹¹ Perubahan ini menekankan perempuan harus berperan aktif

¹¹⁰ Rahmawati dan Hidayah, "Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," ..., h. 114.

¹¹¹ Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1999), h. 189.

sebagai agen perubahan, dan promotor yang dinamis dalam transformasi sosial yang dapat mengubah kehidupan lakilaki maupun perempuan menjadi lebih baik. Amartya Sen juga berpandangan bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan sangat dipengaruhi oleh berbagai kapabilitas yang dimiliki perempuan seperti dalam memperoleh penghasilan secara mandiri, peran ekonomi di luar keluarga, memiliki hak kepemilikan, berpendidikan dan juga ikut berperan dalam pengambilan keputusan di dalam maupun di luar lingkungan keluarga.

Perbedaan kapabilitas tersebut berakibat pada perbedaan pandangan terhadap perempuan. Namun dengan berbagai kemampuan yang dimiliki perempuan mampu berkontribusi positif dalam memperkuat suara atau hak perempuan melalui kemandirian dan pemberdayaan yang dimiliki. Sebagai contoh, perempuan yang ikut serta mencari nafkah secara mandiri akan berdampak pada peningkatan status sosial seorang perempuan di dalam rumah tangga maupun masyarakat. Pendidikan perempuan

juga menjadikan perempuan lebih berpengetahuan dan terampil.

Berbagai peranan penting perempuan dapat terbentuk jika dilakukan pemberdayaan terpadu untuk mendukung peningkatan kemampuan perempuan atas potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan terpadu juga perlu didorong oleh pengakuan atas kemampuan, kemandirian serta emansipasi sosial perempuan yang akan berdampak pada kekuatan untuk membangun kehidupan manusia yang lebih layak dari berbagai aspek kehidupan.

2. Hubungan antara Variabel Tingkat Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Shirazi dan Pramanik mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi yang dihadapi oleh seseorang yang tidak memiliki kecukupan sumber daya demi memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, yang dilihat dari segi ekonomi, sosial, psikologi maupun spiritual.¹¹² Kemiskinan dapat disebabkan oleh keterbelakangan

 $^{^{112}}$ Beik dan Arsyianti, ${\it Ekonomi~Pembangunan~Syariah},$ h. 68.

manusia. Sumber daya manusia merupakan modal terpenting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Kemampuan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki menjadikan negara tumbuh dan mencapai kesejahteraan. Karena keberhasilan dari pembangunan suatu negara merupakan refleksi dari keberhasilan manusia.

Penelitian Jahtu Widya Ningrum, Azizah Hanifa Khairunnisa dan Nurul Huda dengan judul penelitian "Pengaruh Kemiskinan, **Tingkat** Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014 – 2018 dalam Perspektif Islam", menerangkan bahwa kemiskinan saling berhubungan dengan IPM, hal ini terjadi karena kemiskinan dapat menjadi penyebab disparitas dalam meningkatkan Indeks upaya Pembangunan Manusia. 113 Kemiskinan dapat menjadi penyebab terhambatnya seseorang dalam mendapatkan

Ningrum, Khairunnisa, dan Huda, "Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014 - 2018 dalam Perspektif Islam," ..., h. 213.

taraf pendidikan yang baik serta akses kesehatan yang layak. Kemiskinan juga dapat melatarbelakangi terjadinya peningkatan pengangguran dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Sari Dewi, Wiwin Priana Primandhana dan Mohammad Wahed dengan judul "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro", penelitian ini menjelaskan bahwa kemiskinan berhubungan erat dengan pencapaian pembangunan manusia, hal ini ditandai dengan jika terjadi kenaikan angka kemiskinan (diasumsikan faktor lainnya konstan) maka akan terjadi penurunan angka IPM.¹¹⁴ Kemiskinan berdampak pada Indeks Pembangunan manusia, ini dilatarbelakangi karena sulitnya memenuhi kebutuhan dasar diantaranya pendidikan dan kesehatan. Kesulitan ini secara langsung

-

¹¹⁴ Kurnia Sari Dewi, Wiwin Priana Primandhana, dan Mohammad Wahed, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro," *Syntax Idea* Vol. 3, no. 4 (2021): h. 839.

berdampak pada rendahnya produktivitas dan pendapatan yang dihasilkan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Winsv Tarumingkeng, Vekie A. Rumate dan Tri Oldy Rotinsulu dengan judul "Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara", menjelaskan bahwa kondisi ketidakmampuan memenuhi standar kualitas hidup masyarakat didominasi oleh rendahnya pendapatan yang miliki untuk memenuhi kebutuhan dasar baik dari segi kesehatan dan pendidikan. 115

Meire Baldwin dalam Lincolin dan Arsvad konsep lingkaran kemiskinan menerangkan yang dilatarbelakangi oleh hubungan yang saling mempengaruhi antara keadaan keterbelakangan masyarakat yang biasanya terjadi pada masyarakat tradisional dan kekayaan sumber

¹¹⁵ Winsy A. Tarumingkeng, Vikie A. Rumate, dan Tri Oldy Rotinsulu, "Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara," Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah 19, no. No. 6 (2019): h. 85.

daya alam yang belum diberdayakan secara optimal. 116

Maka untuk memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki,
diperlukan tenaga kerja yang dapat terampil dalam
memimpin dan melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi.

Sehingga lingkaran kemiskinan belum dapat terputuskan
jika masih ada faktor penghambat pembangunan, seperti
rendahnya tingkat tabungan, rendahnya pembentukan
modal, rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian
masyarakat.

Menurut Al Arif, kemiskinan perlu dipahami secara utuh, yaitu kondisi miskin bukan hanya berkaitan dengan sulitnya memenuhi kebutuhan material dasar, namun juga berhubungan dengan berbagai dimensi kehidupan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, terjaminnya kehidupan dimasa depan, serta peranan sosial. Manusia perlu memenuhi kebutuhan hidupnya atas berbagai dimensi agar menjalani kehidupan yang sejahtera.

¹¹⁶ Arsyad, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kelima*, ..., h. 112.

¹¹⁷ Arif, Teori Ekonomi Makroekonomi Islam, ..., h. 228.

Menurut Schultz, modal manusia sebagai bagian kualitatif dari sumber daya manusia, sehingga akan berhubungan dengan kemampuan produktivitas manusia. Potensi yang terkandung dalam diri manusia seperti pengetahuan, kemampuan serta keterampilan dapat dikembangkan melalui proses pendidikan formal maupun non formal serta menjaga kesehatan fisik maupun mental.

Human investment theory yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan manusia, baik itu kecerdasan interpersonal maupun kecerdasan intrapersonal. IPM yang dibentuk oleh United Nations Developmen Program dengan tujuan mengukur pencapaian kapabilitas manusia dilihat dari pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara. Peningkatan preferensi manusia dapat mengatasi kemiskinan dengan perbaikan pada 3 hal yaitu menempuh kehidupan sehat dengan jangka waktu yang relatif lama, mempunyai pengetahuan, pekerjaan dan pendapatan untuk

¹¹⁸ Farah dan Sari, "Modal Manusia Dan Produktivitas," ..., h. 23.

memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dengan standar kelayakan hidup.

3. Hubungan antara Variabel Pengeluaran Per Kapita dengan Indeks Pembangunan Manusia

Penelitian A Jauhar Mahya dan Widowati yang berjudul "Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia", menjelaskan bahwa pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator pengukuran Indeks Pembangunan Manusia yang berada pada dimensi standar hidup layak. 119

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Apriansyah Permana yang berjudul "Pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Periode 2012 – 2016", pengeluaran per kapita sebagai biaya yang dikeluarkan oleh anggota rumah tangga untuk keperluan konsumsi baik

Mahya dan Widowati, "Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah , Rata-Rata Lama Sekolah , dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia," h. 126.

membeli barang maupun jasa demi memenuhi kebutuhan hidup keseharian pada periode tertentu. Pengeluaran per kapita mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat atau ketimpangan yang dialami masyarakat sebagai indikator dari standar hidup layak IPM.

Menurut Badan Pusat Statistik Pengeluaran per kapita yaitu pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk keperluan konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama sebulan, yang kemudian pengeluaran tersebut dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran per kapita dapat mencerminkan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pendapat Rahardja dan Manurung yang memandang pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai pengeluaran

¹²⁰ Permana, Rustamunadi, dan Sunardi, "Pengaruh Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Periode 2012 - 2016," ..., h. 4.

¹²¹ Statistik, Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Provinsi Banten 2019, ..., h. 8.

terbesar dalam total pengeluaran agregat. Sehingga memiliki pengaruh yang besar terhadap stabilitas perekonomian suatu negara. Perkembangan konsumsi pada masyarakat relatif cepat menyebabkan perilaku konsumsi masyarakat juga cepat mengalami perubahan. Perkembangan konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat maka jika pendapatan masyarakat naik, maka pengeluaran konsumsi masyarakat pun akan bertambah.

Teori konsumsi Keynes menerangkan bahwa pendapatan disposabel dapat mempengaruhi tingkat konsumsi saat ini, yaitu pengeluaran konsumsi akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Pola pengeluaran per kapita penduduk dipengaruhi pendapatan dan kebutuhan hidup masyarakat baik untuk makanan maupun non makanan, sehingga pola pengeluaran per kapita berbeda. Sehingga pengeluaran per

¹²² Rahardja dan Mandala Manurung, *Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi Dan Makroekonomi) Edisi Ketiga*, ..., h. 257.

¹²³ Ibrahim, Pengantar Ekonomi Makro, ..., h. 42.

kapita dapat mengukur standar kelayakan hidup masyarakat.

Pengeluaran per kapita juga tercermin dalam teori konsumsi pendapatan relatif James S. Duesenberry yang berpandangan bahwa masyarakat memiliki kecenderungan untuk meningkatkan konsumsi ketika terjadi peningkatan pendapatan, serta mengurangi proporsi tabungannya ketika terjadi pengurangan pendapatan untuk tetap mempertahankan kegiatan konsumsinya. 124

Pola pengeluaran sebagai salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk, sehingga jika terjadi pergeseran pola pengeluaran konsumsi penduduk maka menandakan terjadi perubahan pada kesejahteraan penduduk. Pengeluaran per kapita mengukur dimensi standar hidup layak dari IPM dengan berdasarkan nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli, dengan rata-

¹²⁴ Persaulian, Aimon, dan Anis, "Analisis Konsumsi Masyarakat di Indonesia," ..., h. 18.

rata pengeluaran per kapita setahun yang diperoleh dari Susenas.

Kerangka berfikir hubungan antara variabel Indeks Pembangunan Gender, tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita terhadap Indeks Pembangsunan Manusia sebagai berikut:

Gambar 2.1 Hubungan antar Variabel

